KOORDINASI KINERJA MAJELIS ULAMA INDONESIA PROVINSI JAWA TIMUR DALAM RAPAT KERJA DAERAH DAN PROGRAM BIDANG FATWA TAHUN 2017

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Negeri Islam Sunan Ampel Surabaya
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan
Program Sarjana Sosial (S.Sos)

Oleh :
VIVI KURNIATUL HUMAIROH
NIM. B94214062

PROGRAM STUDI MANAJEMEN DAKWAH
JURUSAN DAKWAH
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA

2018

PERTANGGUNGJAWABAN PENULISAN SKRIPSI

Bismillaahirrohmaanirrahiim.

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Vivi Kurniatul Humairoh

NIM : B94214062

Prodi : Manajemen Dakwah

Judul skripsi : Koordinasi Kinerja Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur dalam Rakerda dan Program Bidang Fatwa Tahun 2017

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Skripsi ini tidak pernah dikumpulkan kepada lembaga pendidikan tinggi mana pun untuk mendapatkan gelar akademik apa pun.
2. Skripsi ini adalah benar-benar karya saya secara mandiri dan bukan merupakan hasil plagiasi karya orang lain.
3. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini sebagai plagiasi, saya akan bersedia menanggung segala konsekuensi hukum yang tersedia.

Surabaya, 10 Agustus 2018

Yang menyatakan

METERAI TEMPEL
TGL. 20
4C62FAFF193838658
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Vivi Kurniatul Humairoh
NIM. B94214062

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Skripsi oleh Vivi Kurniatul Humairoh ini telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan.

Surabaya, 2 Agustus 2018

Dosen Pembimbing

Dr. H. Ah. Ali Arifin, MM
NIP. 196212141993031002

PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI

Skripsi oleh Vivi Kurniatul Humairoh ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi.

Surabaya, 2 Agustus 2018
Mengesahkan,
Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,

Dr. H. Abd. Halim, M.Ag.
NIP. 196307251991031003

Penguji I,

Dr. H. Ah. Ali Arifin, MM
NIP. 196212141993031002

Penguji II,

Dr. H. M. Thayib, S.Ag., M.Si
NIP. 197011161999031001

Penguji III,

Dr. H. Achmad Murtafi Harits, Lc., M.Fil.I
NIP. 197003042007011056

Penguji IV,

Bambang Subandi, M.Ag
NIP. 197403032000031001

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Vivi Kurniatul Humairoh
NIM : B94214062
Fakultas/Jurusan : Fakultas Dakwah dan Komunikasi
E-mail address : vivikurma@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☑ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :
KOORDINASI KINERJA MAJELIS ULAMA INDONESIA PROVINSI JAWA TIMUR DALAM RAPAT KERJA DAERAH DAN PROGRAM BIDANG FATWA TAHUN 2017

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 10 Agustus 2018

Penulis

(Vivi Kurniatul Humairoh)
nama terang dan tanda tangan

ABSTRAK

Vivi Kurniatul Humairoh, 2018, Koordinasi Kinerja Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur dalam Rapat Kerja Daerah dan Program Bidang Fatwa tahun 2017.

Koordinasi merupakan proses pengintegrasian tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan dari satuan-satuan yang terpisah, untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien. Koordinasi dianggap sebagai suatu hal yang penting dalam suatu organisasi, lembaga, maupun perusahaan. Tanpa adanya koordinasi yang baik, akan sulit bagi organisasi, lembaga, maupun perusahaan untuk melakukan tugas-tugas atau pekerjaan-pekerjaannya. Selain itu, organisasi, lembaga, maupun perusahaan juga akan sulit untuk mencapai tujuan atau visi dan misinya. Majelis Ulama Indonesia merupakan wadah musyawarah para ulama, *zu'ama*, dan cendekiawan Islam. Majelis Ulama Indonesia bersifat forum, namun bukan merupakan federasi ormas-ormas/kelembagaan Islam. Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur terletak di Jl. Dharmahusada Selatan No. 5 Surabaya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui koordinasi kinerja Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur dalam Rapat Kerja Daerah dan Program Bidang Fatwa tahun 2017. Peneliti menggunakan metode deskriptif dengan pendekattan kualitatif untuk mengidentifikasi permasalahan dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Peneliti melakukan analisis data dengan reduksi data, penyajian data, dan pengambilan keputusan.

Dari penelitian ini dapat diperoleh bahwa, Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur melakukan koordinasi untuk mencapai kinerja yang baik serta mewujudkan visi dan misinya.

Kata kunci: koordinasi dan kinerja.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI iii
MOTTO iv
PERSEMBAHAN v
ABSTRAK.....vi
KATA PENGANTAR.....vii
DAFTAR ISI.....ix

BAB I : PENDAHULUAN.....1
A. Latar Belakang.....1
B. Rumusan Masalah.....4
C. Tujuan Penelitian.....4
D. Manfaat Penelitian.....4
E. Definisi Konsep.....5
F. Sistematika Pembahasan.....7

BAB II : KAJIAN TEORITIK.....9
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan 9
B. Kerangka Teori.....16
1. Koordinasi 16
2. Kinerja 25
C. Koordinasi Kinerja Menurut Perspektif Islam.....26

BAB III : METODE PENELITIAN.....30
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....30
B. Lokasi Penelitian.....31
C. Jenis dan Sumber Data.....31
D. Tahap-tahap Penelitian.....39
E. Teknik Pengumpulan Data.....42
F. Teknik Validitas Data.....44
G. Teknik Analisis Data.....46

BAB IV : HASIL PENELITIAN.....47
A. Gambaran Umum Obyek Penelitian.....47
B. Penyajian Data.....82
1. Program RAKERDA MUI Provinsi Jawa Timur 82
2. Program Bidang Fatwa 103

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Faktor Penghambat Koordinasi MUI Provinsi Jawa Timur.....103
C. Pembahasan Hasil Penelitian.....105
1. Koordinasi Kinerja MUI Provinsi Jawa Timur 105
2. Faktor Penghambat Koordinasi Kinerja MUI Provinsi Jawa Timur 111

BAB V : PENUTUP.....113
A. Simpulan.....113
B. Saran dan Rekomendasi.....114
C. Keterbatasan Penelitian.....115

DAFTAR PUSTAKA.....116

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Koordinasi merupakan proses pengintegrasian tujuan dan kegiatan pada satuan yang terpisah pada suatu organisasi, untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien.[1] Koordinasi bisa bermakna menjaga agar tugas-tugas yang telah dibagi dalam suatu organisasi dapat dikerjakan sesuai aturan, sehingga dapat terwujud tujuan dalam organisasi tersebut. Selain itu, koordinasi merupakan cara menghubungkan, menyatukan, dan menyelaraskan sumber daya manusia dengan pekerjaannya, sehingga semua kegiatan akan berjalan seirama tanpa terjadi kekacauan, tumpang tindih wewenang, percekcokan, dan berbagai masalah lain yang tidak diharapkan.

Koordinasi diperlukan dalam setiap organisasi. Hal ini karena di dalam organisasi pasti terdapat departementasi, yang bertujuan menyusun satuan-satuan organisasi untuk melaksanakan tugasnya.[2] Koordinasi merupakan hal yang penting dalam suatu organisasi, sebab di sana terdapat banyak kegiatan yang berlainan dilakukan oleh banyak orang dalam banyak bagian. Kebutuhan akan koordinasi bisa timbul kapan saja, apabila satu orang atau kelompok bertanggung jawab atas kesempurnaan suatu tugas. Apabila terdapat keadaan saling bergantung di antara kegiatan-kegiatan, maka hasil

[1] Susatyo Herlambang, *Pengantar Manajemen: Cara Mudah Memahami Ilmu Manajemen, Cetakan Pertama* (Yogyakarta: Gosyen Publishing, 2013), hal. 93.

[2] A.W. Widjaya, *Perencanaan Sebagai Fungsi Manajemen* (Jakarta: PT Bina Aksara, 1987), hal. 27.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang efektif akan dapat tercapai hanya apabila kegiatan-kegiatan tersebut dikoordinasikan.[3]

Koordinasi yang efektif tidak mudah dicapai, apalagi apabila pekerjaan menjadi semakin terspesialisasi. Lawrence dan Lorsch menggunakan istilah diferensiasi untuk menjelaskan bagian organisasi yang semakin terspesialisasi. Menurut mereka ada empat macam jenis diferensiasi, yaitu *pertama*, bagian organisasi yang berbeda cenderung mengembangkan tujuan bagian tersebut, metode serta kebiasaan yang berlaku untuk mencapai tujuan tersebut. *Kedua*, orientasi antar bagian dapat berbeda. *Ketiga*, gaya interaksi. *Keempat*, tingkat formalitas.[4]

Alasan utama kebutuhan akan koordinasi yaitu karena departemen dan kelompok kerja saling bergantung.[5] Keduanya bergantung satu sama lain untuk berbagi informasi dan sumber daya guna melaksanakan aktivitas. Semakin besar ketergantungan antar departemen, maka semakin banyak koordinasi yang diperlukan organisasi agar departemen mampu berkinerja dengan efektif.

Kinerja adalah catatan mengenai akibat-akibat yang dihasilkan pada fungsi pekerjaan atau aktivitas selama periode tertentu yang berhubungan dengan tujuan organisasi.[6] Manajemen kinerja bisa dijadikan alat yang dengannya perilaku-perilaku kerja para karyawan dipadukan dengan tujuan-

---

[3] Moekijat, Koordinasi (Suatu Tinjauan Teoritis) Cetakan Pertama, (Bandung: Mandar Maju, 1994), hal. 1.
[4] Mamduh M. Hanafi, *Manajemen: Cetakan 1* (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 1997), hal. 276-277.
[5] Ricky W. Griffin, *Manajemen: Jilid 1* (Jakarta: Erlangga, 2004), hal. 340.
[6] Juliansyah Noor, *Penelitian Ilmu Manajemen: Tinjauan Filosofis dan Praktis*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hal. 271.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tujuan organisasi. Manajemen perilaku kinerja didasarkan pada perilaku, pembelajaran sosial, teori kognitif sosial, dan khususnya prinsip penguatan.[7] Manajemen kinerja dalam organisasi dapat berfungsi memberikan suatu pencerahan dan jawaban dari berbagai permasalahan yang terjadi, baik yang disebabkan oleh faktor internal dan eksternal, sehingga apa yang dialami oleh organisasi pada saat ini tidak membawa pengaruh yang negatif pada aktivitasnya pada saat ini dan yang akan datang.[8]

Lembaga yang akan dibahas oleh peneliti adalah Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur. Majelis Ulama Indonesia merupakan badan hukum perkumpulan yang anomali karena tidak berbasis keanggotaan.[9] Majelis Ulama Indonesia merupakan wadah pertemuan, silaturahim, serta musyawarah para ulama, zu'ama, dan cendekiawan muslim yang berasal dari berbagai unsur ormas-ormas Islam untuk mewujudkan *ukhuwah Islamiyah* dan membicarakan permasalahan umat.

Untuk mewujudkan tujuan Rapat Kerja Daerah (RAKERDA), maka dibutuhkan proses manajemen yang baik. Proses manajemen yang disebut koordinasi inilah yang sangat diperlukan untuk menyelaraskan sumber daya - sumber daya yang ada di dalam Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur, supaya dapat berjalan beriringan dan bekerja sama agar tercapai tujuan dalam Rapat Kerja Daerah tersebut. Dari paparan di atas, maka peneliti mengambil judul "Koordinasi Kinerja Majelis Ulama Indonesia Provinsi

[7] Fred Luthans, *Perilaku Organisasi: Edisi 10* (Yogyakarta: ANDI, 2006), hal. 610.
[8] H. Ismail Nawawi Uha, *Manajemen Sumber Daya Manusia* (Jakarta: VIV Press, 2013), hal. 202.
[9] Wawancara pada Hari Rabu tanggal 1 Agustus 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jawa Timur dalam Rapat Kerja Daerah dan Program Bidang Fatwa Tahun 2017."

B. Rumusan Masalah

Dengan adanya latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana koordinasi dalam Rapat Kerja Daerah dan Program Bidang Fatwa yang dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur?
2. Faktor apa yang menghambat koordinasi yang dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai seberikut:

1. Untuk mengetahui koordinasi yang dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat koordinasi yang dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur.

D. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini, diharapkan dapat membawa beberapa manfaat yang dapat dikembangkan dikemudian hari. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Manfaat Praktis
   a. Memenuhi syarat memperoleh gelar strata 1 (S-1).
   b. Memberi informasi maupun masukan pada Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur dalam melaksanakan koordinasi kinerja.
   c. Memberi inspirasi kepada para pembaca serta peneliti-peneliti lain.
2. Manfaat Teoritis
   a. Menambah khazanah ilmu pengetahuan bidang sumber daya manusia.
   b. Menambah khazanah ilmu pengetahuan khususnya pada topik keorganisasian.

E. Definisi Konsep

Konsep merupakan salah satu unsur pokok dalam suatu penelitian. Konsep merupakan definisi secara singkat dari kelompok fakta atau gejala yang menjadi pokok perhatian.[10] Agar tidak terjadi kercuan makna mengenai sistem koordinasi kinerja, maka peneliti akan memberikan gambaran dari beberapa teori yang berhubungan dengan judul penelitian, diantaranya sebagai berikut:

1. Koordinasi

   Koordinasi adalah penyelarasan secara teratur, atau penyususnan kembali kegiatan-kegiatan yang saling bergantung dari individu-individu untuk mencapai tujuan bersama.[11] Misalnya, dalam sebuah restoran,

[10] Koentjoningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Umum, 1994), hal. 21.
[11] Moekijat, *Koordinasi (Suatu Tinjauan Teoritis) Cetakan Pertama*, (Bandung: Mandar Maju, 1994), hal. 2

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kegiatan-kegiatan juru masak, pelayan, kasir, dan lain-lain harus diselaraskan dengan tepat supaya konsumen dapat menerima pelayanan yang memuaskan. Koordinasi adalah upaya untuk mencapai hasil yang baik melalui keseimbangan (*balancing*), menyesuaikan waktu (*timing*), dan mengintegrasikan pekerjaan yang direncanakan.[12]

2. Kinerja

Cardy mengatakan, *performance management is process of defining, measuring, appraising, providing feedback on, and improving performance*.[13] Arti kinerja sebenarnya berasal dari kata *job performance* dan disebut juga *actual performance* atau prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang telah dicapai oleh seorang karyawan.[14] Kinerja adalah catatan mengenai akibat-akibat yang dihasilkan pada fungsi pekerjaan atau aktivitas selama periode tertentu yang berhubungan dengan tujuan organisasi.[15]

3. Majelis Ulama Indonesia

Majelis Ulama Indonesia (MUI) merupakan wadah musyawarah para ulama, *zu'ama*, dan cendekiawan muslim. Majelis Ulama Indonesia adalah badan hukum perkumpulan yang anomali, karena tidak berbasis anggota.[16] Majelis Ulama Indonesia bersifat forum, namun bukan merupakan federasi

---

[12] Ek. Mochtar Effendy, *Manajemen Suatu Pendekatan Berdasarkan Ajaran Islam*, (Jakarta: Bharatara, 1996), hal. 104.
[13] Juliansyah Noor, *Penelitian Ilmu Manajemen: Tinjauan Filosofis dan Praktis*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hal. 270.
[14] Moeheriono, *Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), hal.96.
[15] Juliansyah Noor, *Penelitian Ilmu Manajemen: Tinjauan Filosofis dan Praktis*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hal. 271.
[16] Wawancara pada Hari Rabu tanggal 1 Agustus 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ormas-ormas/kelembagaan Islam. Kehadiran individu-individu yang mempresentasikan unsur-unsur ormas/kelembagaan Islam bersifat tidak resmi mewakili ormas.

Majelis Ulama Indonesia adalah wadah musyawarah, bukan termasuk organisasi kemasyarakatan (ormas).[17] Majelis Ulama Indonesia tidak memiliki stelsel keanggotaan yang merupakan salah satu ciri dari organisasi kemasyarakatan, seperti ketentuan yang disebutkan dalam Undang-undang No. 8 tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Di sisi lain Mjelis Ulama Indonesia juga bukan badan hukum.[18] Sebagai lembaga yang bersifat forum, eksistensi kelembagaan Majelis Ulama Indonesia diakui baik dari sisi peranannya maupun dari sisi kelembagaannya, baik di pusat maupun di daerah.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa, koordinasi kinerja adalah penyelarasan yang teratur atau penyusunan kembali kegiatan yang saling bergantung dari individu-individu, untuk mengukur sebuah hasil dari pekerjaan yang dilakukan, baik antara vertikal maupun horizontal pada Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan urutan dalam penulisan skripsi. Dalam penelitian ini, peneliti membagi penelitian menjadi lima bab dan

[17] Dokumentasi (*Pedoman Penyelenggaraan Organisasi Majelis Ulama Indonesia*, (Surabaya: Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur, 2013, hal. 13.)

[18] Dokumentasi (*Pedoman Penyelenggaraan Organisasi Majelis Ulama Indonesia*, Surabaya: Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur, 2013, hal. 25.)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masing-masing bab mengandung pembahasan. Berikut adalah sistematika pembahasannya:

BAB I: Pendahuluan

Bab ini berisikan gambaran umum yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi konsep, dan sistematika pembahasan.

BAB II: Kerangka Teoritik

Bab ini menguraikan penjelasan tentang kerangka teoritik yang meliputi penelitian terdahulu yang relevan, kerangka teoritik yang berkaitan dengan koordinasi, dan meninjau kerangka teoritik dalam perspektif Islam.

BAB III: Metode Penelitian

Bab ini menguraikan hal-hal yang berkaitan dengan pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, tahap-tahap penelitian, teknik pengumpulan data, teknik validitas data, dan teknik analisis data.

BAB IV: Penyajian Data

Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum obyek penelitian, penyajian dan analisis data yang meliputi pembahasan mengenai penyajian data, untuk menggambarkan data yang ditemukan dalam penelitian mengenai sistem koordinasi pada Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Jawa Timur.

BAB V: Penutup

Pada bab ini menjelaskan hasil akhir penelitian mengenai simpulan, saran, rekomendasi, dan terakhir keterbatasan penelitian.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II
KAJIAN TEORITIK

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Ada beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini, diantaranya yaitu: sebagai berikut:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Soritua Ritonga yang berjudul Koordinasi antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa di Desa Batang Pane III Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara. Penelitian ini membahas tentang faktor yang mempengaruhi koordinasi antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa di Desa Batang Pane III Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara.[19]

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Nur Fajriana yang berjudul Koordinasi Kepala Desa dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Siatang Keteban Kecamatan Pasir Belengkong Kabupaten Paser. Penelitian ini membahas tentang pembangunan di Desa Suatang Ketebang masih belum memadai, ditandai dengan belum terpenuhinya berbagai fasilitas umum.[20]

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Lukman Hakim dan Widodo J. Pudjirahardjo yang berjudul Optimalisasi Proses Koordinasi Program Keselamatan Pasien (*Patient Safety*) di Rumah Sakit X Surabaya. Penelitian

[19] Soritua Ritonga, *Koordinasi antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa di Desa Batang Pane III Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara*, Jurnal Ilmiah (Vol. 1, No. 2, Agustus 2017).

[20] Nur Fajriana, *Koordinasi Kepala Desa dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Suatang Keteban Kecamatan Pasir Belengkong Kabupaten Paser*, eJournal Ilmu Pemerintahan (Vol. 2 No. 2, tahun 2014).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ini membahas tentang analisis proses koordinasi program keselamatan pasien (*patient safety*) di Rumah Sakit X Surabaya.[21]

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Viska Mediana yang berjudul Analisis Koordinasi Dinas Perhubungan dalam PenyediaanPelayanan Jasa Transportasi Angkutan Kota di Depok. Penelitian ini membahas tentang koordinasi yang selama ini dilakukan oleh Dinas Perhubungan sudah terjalin, seperti terdapatnya ruang untuk berinteraksi sebagai forum koordinasi antara *stakeholder* penyelenggaraan pelayanan jasa transportasi perkotaan, yakni Tim Korlantas. Akan tetapi, keterlibatan pihak swasta yakni para pengusaha angkot dan DPC Organa dalam pengambilan kebijakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan transportasi angkutan kota di Depok belum secara penuh, masih sebatas permasalahan insidental. Koordinasi masih terkendala oleh permasalahan-permasalahan teknis seperti, komunikasi yang dilakukan tidak dua arah sehingga, antara pihak yang memberi kebijakan dan pihak yang menerima kebijakan tidak terkoordinasi dengan baik. Mekanisme koordinasi yang dilakukan Dinas Perhubungan bersama pihak-pihak terkait dalam penyediaan pelayanan angkutan kota yaitu mekanisme hirarkis. Hambatan dalam berkoordinasi lebih mengarah kepada teknisnya seperti, komunikasi antara koordinator dan penerima arahan terkadang tidak sinkron. Pedoman yang ada tidak dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya, hanya sebatas

[21] Lukman Hakim dan Widodo J. Pudjirahardjo, *Optimalisasi Proses Koordinasi Program Keselamatan Pasien (Patient Safety) di Rumah Sakit X Surabaya*, Jurnal Administrasi Kesehatan Indonesia (Vol. 2, No. 3, Juli-September 2014).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

wacana. Pemerintah lebih rutin lagi dalam melakukan monitoring pelaksanaan KPP dan seragam pengemudi.[22]

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Mona Variesta Inna Chutmaisinthia yang berjudul Koordinasi Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Penyaluran Dana Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) di Desa Ngepanrejo Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang. Penelitian ini membahas tentang peran dan pola koordinasi antara Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam penyaluran dana BLSM yang merupakan amanah dari pemerintah pusat.[23]

Berbeda dengan penelitian terdahulu yang telah diuraikan di atas, penelitian ini menekankan pada koordinasi kinerja Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur dalam Rapat Kerja Daerah dan Program Bidang Fatwa tahun 2017. Hal tersebut untuk mengetahui cara Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur dalam melakukan koordinasi kinerja. Dengan adanya koordinasi tersebut, Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur berharap untuk dapat menyelaraskan secara teratur serta menyusun kegiatan-kegiatan yang saling bergantung dari individu-individu untuk mencapai tujuan bersama. Untuk lebih mudah difahami persamaan dan perbedaan antara

[22] Viska Mediana, *Analisis Koordinasi Dinas Perhubungan dalam PenyediaanPelayanan Jasa Transportasi Angkutan Kota di Depok*, Skripsi, (Depok: Progam Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia).

[23] Mona Variesta Inna Chutmaisinthia, *Koordinasi Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Penyaluran Dana Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) di Desa Ngepanrejo Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang*, Skripsi, (Yogyakarta: Jurusan Siyasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penelitian ini dan penelitian terdahulu, maka dapat ditabulasikan sebagai berikut.

Tabel 1.1 Penelitian terdahulu yang relevan.

No.	Judul	Peneliti	Masalah	Lokasi	Simpulan
1.	Koordinasi antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa di Desa Batang Pane III Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara.	Soritua Ritonga	Faktor yang mempengaruhi koordinasi antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa di Desa Batang Pane III Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara.	Desa Batang Pane III Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara.	- Koordinasi yang dijalankan oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa selama ini berjalan kurang baik, masih terdapat permasalahan yang terjadi. Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa bekerja dengan berjalan sendiri-sendiri tanpa adanya kerja sama yang baik, akibatnya pembangunan yang ada di Desa Batang Pane III menjadi terkendala. - Faktor yang mempengaruhi koordinasi Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa di Batang Pane adalah tidak adanya komunikasi yang baik, keharmonisasian, hubungan kerja yang belum baik, dan masalah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

					anggota Badan Permusyawaratan Desa yang banyak memiliki pekerjaan lain di luar.
2.	Koordinasi kepala desa dalam pembangunan infrastruktur di Desa Siatang Keteban Kecamatan Pasir Belengkong Kabupaten Paser.	Nur Fajriana	Pembangunan di Desa Suatang Ketebang masih belum memadai ditandai dengan belum terpenuhinya berbagai fasilitas umum.	Desa Siatang Keteban Kecamatan Pasir Belengkong Kabupaten Paser.	Secara umum koordinasi kepala desa dalam pembangunan infrastruktur di Desa Suatang Keteban sudah dilakukan melalui koordinasi internal dan eksternal . koordinasi internal dilakukan melalui koordinasi vertikal dengan aparat desa, koordinasi horizontal dengan BPD dan koordinasi diagonal dengan LPM, sedangkan koordinasi eksternal dilakukan dengan pihak ketiga yaitu perusahaan swasta.
3.	Optimalisasi Proses Koordinasi Program Keselamatan Pasien (*Patient Safety*) di Rumah Sakit X Surabaya.	Lukman Hakim dan Widodo J. Pudjirahardjo	Proses Koordinasi Program Keselamatan Pasien (*Patient Safety*) di Rumah Sakit X Surabaya.	Rumah Sakit X Surabaya.	Tingkat pengetahuan dan hubungan komunikasi petugas antar unit kerja terkait proses koordinasi program KPRS diidentifikasi masih belum optimal.
4.	Analisis Koordinasi Dinas Perhubunga	Viska Median a	Koordinasi antara Dinas Perhubunga	Dinas Perhubungan Kota	Koordinasi yang selama ini dilakukan oleh Dinas Perhubungan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

	n dalam Penyediaan Pelayanan Jasa Transportasi Angkutan Kota di Depok.		n Kota Depok bersama instansi terkait dalam mengadakan penyuluhan terhadap sopir angkutan kota dalam menertibkan trayek guna terwujudnya pelayanan publik yang memberikan kenyamanan dan keamanan bagi masyarakat.	Depok.	sudah terjalin seperti terdapatnya ruang untuk berinteraksi sebagai forum koordinasi antara *stakeholder* penyelenggaraan pelayanan jasa transportasi perkotaan yakni Tim Korlantas, tetapi keterlibatan pihak swasta yakni Para Pengusaha angkot dan DPC Organa dalam pengambilan kebijakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan transportasi angkutan kota di Depok belum secara penuh masih sebatas permasalahan insidental. Koordinasi masih terkendala oleh permasalahan-permasalahan teknis seperti komunikasi yang dilakukan tidak sua arah sehingga antara pihak yang memberi kebijakan dan pihak yang menerima kebijakan tidak terkoordinasi dengan baik.
5.	Koordinasi Pemerintah Desa dan	Mona Variesta Inna	- Peran dan pola koordinasi	Desa Ngepanrejo	BPD di Desa Ngepanrejo bisa dikatakan belum

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

	Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Penyaluran Dana Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) di Desa Ngepanrejo Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang.	Chutmaisinthia	Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Nganparejo, Kecamatan Bandongan, Kabupaten Magelang dalam mekanisme penyaluran dana BLSM untuk menjalankan amanah dari pemerintah pusat. - Perspektif siyasah terhadap koordinasi yang telah dilakukan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam penyalura	Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang.	menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik, peran BPD dalam pembangunan desa masih tergolong minim. Jika dianalisis dengan perspektif *siyasah* maka koordinasi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dan BPD di Desa Ngepanrejo dalam pembagiab dana BLSM masih belum berjalan dengan baik karena tidak ada kemaslahatan dalam pelaksanaannya, keadilan tidak keadilan tidak diterapkan dengan masih adanya masyarakat miskin yang tidak terdata berarti koordinasi tidak berjalan dengan baik.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

			n dana BLSM.		
6.	Sistem koordinasi kinerja pada Lembaga Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur.	Vivi Kurniatul Humairoh.	Penelitian ini membahas: a. Koordinasi yang dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur. b. Faktor yang menghambat koordinasi yang dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur.	Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur di Jl. Dharmahusada Selatan No. 5 Surabaya.	?

B. Kerangka Teori

1. Koordinasi

a. Pengertian Koordinasi

Koordinasi adalah proses pengintegrasian tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan dari satuan-satuan yang terpisah (unit-unit) suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien. Stoner dan Wankel menyoroti koordinasi dikaitkan dengan rentang manajemen dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

desain organisasi. Mereka mengatakan kemampuan manajer untuk mengkoordinasikan secara efektif, sebagian tergantung pada jumlah bawahan yang melapor kepada manajer dalam perusahaan. Jumlah ini dikenal sebagai "rentang manajemen" (ada yang menyebutnya sebagai rentang kendali (*span of control*)).[24]

Koordinasi adalah tindakan yang diambil oleh manajer dalam kegiatan untuk mendapatkan kepastian dari perbedaan yang ada dalam berbagai macam pekerjaan, atau berbagai macam orang yang bekerja agar dapat menciptakan keadaan yang harmonis dan seimbang dalam usaha mencapai hasil yang diharapkan.[25] Tingkat ketergantungan antar bagian dan kebutuhan komunikasi dalam melaksanakan pekerjaan tertentu, akan menentukan sejauh mana koordinasi diperlukan.[26] Apabila suatu pekerjaan tergantung pada pekerjaan lain, kebutuhan koordinasi akan semakin tinggi.

Koordinasi diartikan sebagai proses menghubungkan aktivitas dari berbagai departemen dalam organisasi.[27] Dengan kata lain, koordinasi adalah upaya untuk mencapai hasil yang baik melalui keseimbangan (*balancing*), menyesuaikan waktu (*timing*), dan mengintegrasikan pekerjaan yang direncanakan.[28]

---

[24] Dydiet Hardjito, *Teori Organisasi dan Teknik Pengorganisasian* (Jakarta: Raja Granfindo Persada, 1997), hal. 47.
[25] Ek. Mochtar Effendy, *Manajemen Suatu Pendekatan Berdasarkan Ajaran Islam*, (Jakarta: Bharatara, 1996), hal. 103.
[26] Mamduh M. Hanafi, *Manajemen: Cetakan 1* (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 1997), hal. 276.
[27] Ricky W. Griffin, *Manajemen: Jilid 1* (Jakarta: Erlangga, 2004), hal. 339.
[28] Ek. Mochtar Effendy, *Manajemen: Suatu Pendekatan Berdasarkan Ajaran Islam* (Jakarta: Bhratara, 1996), hal. 104.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Coordinating merupakan sinkronisasi yang teratur dari usaha-usaha individu yang berhubungan dengan jumlah, waktu, dan tujuan mereka, sehingga dapat diambil tindakan yang serempak menuju sasaran yang telah ditetapkan.[29] Untuk mencapai koordinasi tersebut setiap anggota perusahaan harus dapat melihat bagaimana kegiatan-kegiatan perseorangan dapat membantu pencapaian tujuan perusahaan.

Koordinasi dapat diartikan sebagai pengaturan yang tertib dari kumpulan/gabungan usaha, untuk menciptakan kesatuan tindakan dalam mencapai tujuan bersama. Koordinasi merupakan azas pertama dari organisasi. Bahkan azas satu-satunya, karena azas lainnya semua berada di bawahnya (*sub-ordinated*). Azas-azas lainnya itu adalah azas-azas melalui mana koordinasi menjadi efektif.[30]

Di dalam manajemen terdapat fungsi koordinasi manajemen. Fungsi ini mengusahakan agar setiap bagian perusahaan bekerja sama menurut rencana dan menjamin bahwa seluruh tim tetap bekerja sama. Fungsi ini menyeimbangkan kebutuhan atau kepentingan departemen yang berbeda-beda dan bertentangan.[31]

Rasa saling percaya juga dapat berperan sebagai katalisator untuk memudahkan koordinasi kegiatan *non* rutin di dalam lingkungan yang bergejolak. Gittell dan Weiss mengatakan bahwa, mekanisme

---

[29] George R. Terry, penerjemah J. Smith D.F.M., *Prinsip-Prinsip Manajemen* (Jakarta: Bumi Aksara, 1993), hal. 19.

[30] Prof. Dr. J. Panglaykim dan Drs. Hazil Tanzil, *Manajemen Suatu Pengantar* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1960), hal. 90.

[31] D.W. Foster, *Manajemen Perusahaan manajemen yang sukses di perusahaan* (Jakarta: Erlangga, 1984), hal. 156.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perencanaan yang birokratik biasanya lebih cocok untuk menjalankan koordinasi yang perlu menerobos batas-batas fungsional, yang seringkali diperkuat oleh garis-garis pemisah individual seperti, status, identitas profesional, dan keahlian khusus.[32]

b. Ciri-ciri Koordinasi

Koordinasi mempunyai beberapa ciri-ciri, diantaranya yaitu sebagai berikut:

1) Tanggung jawab koordinasi terletak pada pimpinan, oleh karena itu koordinasi merupakan tugas pimpinan.
2) Adanya proses (*continues process*), karena koordinasi adalah pekerjaan pimpinan yang bersifat berkesinambungan dan harus dikembangkan sehingga, tujuan dapat tercapai dengan baik.
3) Konsep kesatuan tindakan, berarti bahwa harus mengatur sedemikian rupa usaha-usaha setiap kegiatan individu sehingga, terdapat adannya keserasian dalam mencapai hasil.
4) Tujuan organisasi adalah tujuan bersama, kesatuan dari usaha meminta suatu pengertian kepada semua individu, agar ikut serta melaksanakan tujuan sebagai kelompok di mana mereka bekerja.[33]

c. Macam-macam Koordinasi

[32] Frans Mardi Hartanto, *Paradigma Baru Manajemen Indonesia* (Bandung: Mizan Pustaka, 2009), hal. 248-249.
[33] Rois Arifiin dan Helmi Muhammad, *Pengantar Manajemen*, (Malang: Empatdua, 2016), Hal. 70-71.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Terdapat tiga macam keadaan yang saling bergantungan (*interdependence*), diantaranya yaitu:

1) Keadaan saling bergantungan yang disatukan (*pooled interdependence*). Contoh, kepala sekolah berkoordinasi dengan Kepala Dinas Kesehatan dan Dinas Tenaga Kerja dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya siswa di sekolah.
2) Keadaan saling bergantungan berurutan (*sequential interdependence*). Contoh, penilaian kinerja menanti pelaksanakan kerja selesai, sedangkan pelaksanaan kerja menanti perencanaan kerja selesai.
3) Keadaan saling bergantungan timbal balik (*reciprocal interdependence*). Contoh, untuk meningkatkan NEM siswa, SMP melaksanakan PBM dengan sebaik-baiknya. Bersamaan dengan itu, kepala sekolah melalui bagian perlengkapan menyediakan sarana dan prasarana KBM-nya untuk memenuhi kebutuhan guru-guru dan siswa-siswanya. Pengurus BP3 memotivasi orang tua/wali siswa agar mengawasi dan membina anak-anaknya supaya rajin belajar.[34]

d. Jenis-jenis Koordinasi

Ada beberapa jenis koordinasi yang dikemukakan oleh para ilmuwan dan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang

[34] Husaini Usman, *Manajemen: Teori Praktik dan Riset Pendidikan Edisi kedua*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hal. 410-412.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikan di daerah, yaitu sebagai berikut:[35]

1) Menurut Drs. Soewarno Handayaningrat ada dua jenis koordinasi, yaitu koordinasi intern dan koordinasi ekstern.
   a) Koordinasi intern terdiri atas koordinasi vertkal, koordinasi horizontal, dan koordinasi diagonal.
      (1) Koordinasi vertikal atau koordinasi struktural, dimana antara yang mengkoordinasikan dengan yang dikoordinasikan secara struktural terdapat hubungan hierarkhis. Hal ini dapat juga dikatakan koordinasi yang bersifat hierarkhis, karena satu dengan lainnya berada pada satu garis komando.
      (2) Koordinasi horizontal yaitu koordinasi fungsional, dimana kedudukan antara yang mengkoordinasikan dan yang dikoordinasikan mempunyai kedudukan setingkat eselonnya. Menurut tugas dan fungsinya keduanya mempunyai kaitan satu dengan yang lain sehingga perlu dilakukan koordinasi.
      (3) Koordinasi diagonal yaitu koordinasi fungsional, dimana yang mengkoordinasikan mempunyai kedudukan yang lebih tinggi tingkat eselonnya dibandingkan yang dikoordinasikan, tetapi satu dengan lainnya tidak berada pada satu garis komando.

[35] Moekijat, *Koordinasi (Suatu Tinjauan Teoritis) Cetakan Pertama*, (Bandung: Mandar Maju, 1994), hal. 29-34

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) Koordinasi ekstern, termasuk koordinasi fungsional. Dalam koordinasi ekstern yang bersifat fungsional, koordinasi itu hanya bersifat horizontal dan diagonal.

(1) Koordinasi ekstern yang bersifat horizontal, misalnya koordinasi yang dilakukan oleh Kepala Direktorat Bina Program, Direktorat Jenderal Transmigrasi terhadap Kepala Direktorat Penyiapan tanah pemukiman Transmigrasi, Direktorat Jenderal Bina Marga.

(2) Koordinasi ekstern yang bersifat diagonal, misalnya koordinasi yang dilakukan oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara (BAKN) terhadap para Kepala Biro Kepegawaian tiap-tiap Departemen.

2) Menurut Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang koordinasi kegiatan instansi vertikal di daerah pasal 1, ada tiga jenis koordonasi, yaitu:

a) Koordinasi fungsional, antara dua atau lebih instansi yang mempunyai program yang berkaitan erat.

b) Koordinasi instansional, terhadap beberapa instansi yang menaungi satu urusan tertentu yang bersangkutan.

c) Koordinasi teritorial, terhadap dua atau lebih wilayah dengan program tertentu.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Koordinasi dapat dibedakan menjadi dua,[36] yaitu:

a) Koordinasi hierarkis (vertikal), yaitu yang dilakukan oleh pejabat pimpinan dalam suatu instansi terhadap pejabat atau instansi di bawahnya.

b) Koordinasi fungsional, yaitu yang dilakukan oleh pejabat atau suatu instansi terhadap pejabat atau instansi lainnya, yang tugasnya saling berkaitan berdasarkan asas fungsionalisasi. Koordinasi ini dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu:

   (1) Koordinasi fungsional horizontal dilakukan oleh seorang atau suatu instansi terhadap pejabat atau instansi lain yang setingkat.

   (2) Koordinasi fungsional diagonal dilakukan oleh seorang pejabat atau instansi terhadap pejabat atau instansi lain yang lebih rendah tingkatannya, tetapi bukan bawahannya.

   (3) Koordinasi fungsional teritorial dilakukan oleh seorang pejabat atau instansi terhadap pejabat atau instansi lainnya yang berada dalam suatu wilayah tertentu, dimana semua urusan yang ada dalam wilayah tersebut menjadi tanggung jawabnya.

e. Masalah-masalah Koordinasi

[36] Husaini Usman, *Manajemen: Teori Praktik dan Riset Pendidikan Edisi kedua*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hal. 413.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ada empat tipe perbedaan dalam sikap dan cara kerja yang mempersulit tugas pengkoordinasian, yaitu:

1) Perbedaan dalam orientasi terhadap tujuan tertentu.
2) Perbedaan dalam orientasi waktu.
3) Perbedaan dalam orientasi antar pribadi (interpersonal).
4) Perbedaan dalam formalitas struktur.[37]

Menurut Tosi dan Carroll, masalah-masalah koordinasi timbul karena dua hal, diantaranya yaitu:

1) Kondisi organisasi
   a) Subsistem-subsistem silang bagian.
   b) Perbedaan jadwal waktu.
   c) Jarak geografis.
2) Faktor manusia
   a) Persaingan mengenai sumber daya.
   b) Perbedaan dalam status dan arus pekerjaan.
   c) Tujuan-tujuan yang bertentangan.
   d) Penglihatan, sikap, dan nilai yang berlainan.
   e) Wewenang dan penunjukkan pekerjaan yang meragukan.
   f) Usaha menguasai atau mempengaruhi.[38]

Masalah-masalah pengkoordinasian juga dapat disebabkan oleh dua hal, yaitu:

[37] Rois Arifiin dan Helmi Muhammad, *Pengantar Manajemen*, (Malang: Empatdua, 2016), hal. 70.
[38] Moekijat, *Koordinasi (Suatu Tinjauan Teoritis) Cetakan Pertama*, (Bandung: Mandar Maju, 1994), hal. 99-106.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Situasi organisasi

a) Apabila sub sistem-sub sistem organisasi menyilang batas-batas bagian.

b) Apabila kegiatan-kegiatan yang saling bergantungan mempunyai jadwal waktu yang berlainan.

c) Apabila jarak geografis di antara bagian-bagian sangat jauh.

2) Faktor manusia

a) Persaingan sumber daya.

b) Perbedaan dalam status dan arus pekerjaan.

c) Tujuan-tujuan yang bertentangan.

d) Pandangan, sikap, dan nilai yang berbeda.[39]

2. Kinerja

Kinerja adalah suatu perbuatan, suatu prestasi, suatu pameran keterampilan.[40] Armstrong dan Baron mendefinisikan manajemen kinerja sebagai pendekatan strategis dan terpadu untuk menyampaikan sukses berkelanjutan pada organisasi, dengan memperbaiki kinerja karyawan, mengembangkan kapabilitas tim, dan kontributor individu.[41] Kinerja bisa diartikan sebagai hasil kerja dan perilaku kerja yang telah dicapai dalam menyelesaikan tugas-tugas dan tanggung jawab yang diberikan dalam

[39] Husaini Usman, *Manajemen: Teori Praktik dan Riset Pendidikan Edisi kedua*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hal. 426-428.

[40] Juliansyah Noor, *Penelitian Ilmu Manajemen: Tinjauan Filosofis dan Praktis*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hal. 270.

[41] H. Ismail Nawawi Uha, *Manajemen Sumber Daya Manusia* (Jakarta: VIV Press, 2013), hal. 188.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

suatu periode tertentu.[42] Gibson mendefinisikan kinerja (*performance*) sebagai "*... is considered to be a multiplicative function of motivation (the force) and ability*."[43] Menurut Oxford Dictionary, kinerja (performance) merupakan suatu tindakan proses atau cara bertindak atau melakukan fungsi organisasi.[44] Kinerja juga diartikan sebagai suatu pelaksanaan fungsi-fungsi yang dituntut dari seseorang.[45]

C. Koordinasi Kinerja dalam Perspektif Islam

Dalam suatu koordinasi diperlukan adanya keterkaitan antara satu sumber daya manusia dengan yang lainnya, kerjasama antar tim, serta adanya saling ketergantungan antara satu bagian dengan bagian yang lain. Berikut beberapa hadits yang menjelaskan tentang hal tersebut.

أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْهَيْثَمِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ
عَنْ بُرَيْدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ جَدِّهِ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا وَقَالَ
الْخَازِنُ الْأَمِينُ الَّذِي يُعْطِي مَا أُمِرَ بِهِ طَيِّبًا بِهَا نَفْسُهُ أَحَدُ الْمُتَصَدِّقَيْنِ[46]

Telah mengabarkan kepadaku 'Abdullah bin Al Haitsam bin 'Utsman dia berkata; Telah menceritakan kepada kami 'Abdurrahman bin Mahdi dia berkata; Telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Buraid bin Abu Burdah dari Kakeknya dari Abu Musa dia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya bagaikan satu bangunan yang sebagiannya dengan sebagian yang lain saling menopang. Beliau juga bersabda: "Sesungguhnya bendahara yang dapat dipercaya adalah orang yang memberikan apa yang diperintahkan kepadanya secara baik, dan hatinya

[42] Kasmir, *Manajemen Sumber Daya Manusia (Terori dan Praktik)*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2016), hal. 182.
[43] Juliansyah Noor, *Penelitian Ilmu Manajemen: Tinjauan Filosofis dan Praktis*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hal. 270.
[44] Moeheriono, *Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), Hal. 96.
[45] Juliansyah Noor, *Penelitian Ilmu Manajemen: Tinjauan Filosofis dan Praktis*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hal. 270.
[46] H.R. An-Nasai: 2513, *Aplikasi Kitab 9 Imam*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merasa rela hingga pun menjadi salah satu dari dua pemberi sedekah." (H.R. An-Nasai: 2513)[47]

Dalam hadits tersebut, Rasulullah shallahu ‘alaihi wasallam bersabda bahwa, seorang mukmin dengan mukmin lainnya bagaikan satu bangunan. Bagian satu dengan bagian lainnya saling menopang.

Hadits di atas dapat diambil sebuah pelajaran mengenai koordinasi, yaitu saling adanya keterkaitan antara satu bagian dengan bagian lainnya. Dengan demikian, dalam sebuah organisasi tidak bisa melaksanakan tugas atau pekerjaannya sendiri-sendiri. Karena adanya keterkaitan antara satu bagian dengan bagian yang lainnya.

أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ أَنْبَأَنَا شَرِيكٌ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ قَالَ كَانَ عَمَّايَ يَزْرَعَانِ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ وَأَبِي شَرِيكُهُمَا وَعَلْقَمَةُ وَالْأَسْوَدُ يَعْلَمَانِ فَلَا يُغَيِّرَانِ[48]

Telah mengabarkan kepada kami Ali bin Hujr telah memberitakan kepada kami Syarik dari Abu Ishaq dari Abdur Rahman bin Al Aswad, dia berkata; "Dua orang pamanku bercocok tanam dengan mendapatkan sepertiga dan seperempat dan ayahku bekerjasama dengan keduanya, Alqomah dan Al Aswad mengetahui hal itu namun mereka tidak mengingkarinya." (H.R. An-Nasai: 3871)[49]

Dalam hadits tersebut, dikisahkan bahwa Ali bin Hujr telah memberitakan kepada Syarik dari Abu Ishaq dari Abdur Rahman bin Al Aswad bahwa, dua orang pamannya bercocok tanam dengan mendapatkan sepertiga dan seperempat. Ayahnya ikut bekerjasama dengan keduanya.

Hadits di atas dapat diambil sebuah pelajaran mengenai koordinasi, yaitu saling adanya kerjasama. Suatu organisasi tidak akan bisa berkembang tanpa adanya kerjasama antara sumber daya manusia yang satu dan yang lainnya di

[47] Ibid.
[48] H.R. An-Nasai: 3871, *Aplikasi Kitab 9 Imam*.
[49] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalamnya. Suatu pekerjaan akan lebih mudah dan cepat selesai jika dilakukan dengan kerjasama. Karena itulah, dalam koordinasi dibutuhkan danya kerjasama.

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَعَنْ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ الْأَسْوَدِ قَالَا قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
يَا رَسُولَ اللَّهِ يَصْدُرُ النَّاسُ بِنُسُكَيْنِ وَأَصْدُرُ بِنُسُكٍ فَقِيلَ لَهَا انْتَظِرِي فَإِذَا طَهُرْتِ فَاخْرُجِي إِلَى التَّنْعِيمِ فَأَهِلِّي ثُمَّ ائْتِينَا بِمَكَانِ كَذَا وَلَكِنَّهَا عَلَى قَدْرِ نَفَقَتِكِ أَوْ نَصَبِكِ[50]

Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Yazid bin Zurai' telah menceritakan kepada kami Ibnu 'Aun dari Al Qasim bin Muhammad. Dan dari Ibnu 'Aun dari Ibrahim dari Al Aswad keduanya berkata; 'Aisyah radliallahu 'anha berkata; "Wahai Rasulullah, orang-orang selesai dengan mengambil dua manasik sedangkan aku hanya satu. Maka dikatakan kepadanya; "Tunggulah, jika kamu sudah suci maka keluarlah menuju Tan'im lalu berihramlah kemudian temuilah kami di tempat ini namun derajatnya tergantung pengorbanan dan tingkat kesulitanmu". (H.R. Bukhari: 1662)[51]

Dalam hadits tersebut, dikisahkan bahwa, 'Aisyah radliallahu 'anha berkata kepada Rasulullah Shallahu ‘alaihi wasallam bahwa, orang-orang selesai mengambil dua manasik sedangkan 'Aisyah radliallahu 'anha hanya satu. kemudian Rasulullah shallahu ‘alaihi wasallam menyuruhnya untuk menunggu sampai suci. Setelah itu barulah 'Aisyah radliallahu 'anha bisa melaksanakan ihram. Akan tetapi, derajat yang diperolehnya tergantung dengan pengorbanan dan tingkat kesulitan yang dihadapinya.

Hadits di atas dapat diambil sebuah pelajaran mengenai koordinasi, yaitu saling adanya ketergantungan. Suatu organisasi memiliki ketergantungan antara bagian yang satu dengan bagian yang lainnya. Hal ini karena adanya

[50] H.R. Bukhari: 1662, *Aplikasi Kitab 9 Imam*.
[51] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

saling keterkaitan antara satu bagian dengan bagian yang lainnya untuk bekerjasama dalam menjalankan koordinasi.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa, dalam melaksanakan koordinasi perlu adanya keterkaitan, kerjasama, dan saling ketergantungan antara sumber daya manusia yang satu dengan yang lainnya. Dengan demikian, maka suatu koordinasi dapat berjalan dengan baik tanpa adanya kesalahpahaman, sehingga tujuan dari suatu organisasi dapat dicapai bersama-sama.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III
METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menjelaskan tentang sistem koordinasi kinerja di Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif adalah salah satu metode penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman tentang kenyataan melalui proses berfikir induktif.[52] Menurut Bogdan dan Taylor seperti yang dikutip Lexy J. Moleong, penelitian kualitatif yaitu sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif, berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.[53]

Menurut Miles dan Huberman dalam Basrowi menjelaskan bahwa, penelitian kualitatif dilaksanakan melalui kontak yang intens dan lama dengan lapangan atau suatu situasi.[54] Penelitian kualitatif merupakan suatu sistem penelitian dengan mendeskripsikan data-data yang telah dikumpulkan dari pihak-pihak yang diteliti atau diamati, yang dituangkan dalam bentuk kata-kata/kalimat. Peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif dalam penelitian ini. Hal ini berarti peneliti hanya menggambarkan atau memaparkan koordinasi kinerja Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur dalam Rapat Kerja Daerah dan Program Bidang Fatwa tahun 2017.

---

[52] Evi Martha dan Sudarti Kresno, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Untuk Bidang Kesehatan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), hal. 2.
[53] Lexy J.Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosydakarya, 2008), hal. 4.
[54] Evi Martha dan Sudarti Kresno, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Untuk Bidang Kesehatan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), hal. 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penelitian kualitatif menekankan kesesuaian data dengan tujuan penelitian, bukan mencari kuantitas data. Peran peneliti dalam penelitian yang menggunakan metode kualitatif ini sangat penting, supaya peneliti dapat mengetahui keadaan yang sebenarnya. Data yang lengkap akan memudahkan peneliti untuk menjelaskan keadaan yang terjadi. Oleh karena itu, untuk mengetahui keadaan nyata tentang sistem koordinasi kinerja yang digunakan oleh Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur, dalam penelitian ini peneliti menggunajan jenis penelitian deskriptif.

B. Lokasi penelitian

Lokasi yang dipilih dalam penelitian ini yaitu Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur yang berada di Jl. Dharmahusada Selatan No. 5 Surabaya.[55] Lokasi tersebut cukup efektif, karena lokasi tersebut juga merupakan tempat praktik kerja profesi peneliti. Dengan demikian, penelitian tersebut dapat dilakukan secara mendalam, efektif, serta efisien.

C. Jenis dan Sumber Data

Data merupakan kumpulan informasi atau himpunan fakta yang diperoleh dari suatu pengamatan, yang akan diolah dan dianalisis dengan metode tertentu. Dengan demikian maka, akan menghasilkan suatu hal yang dapat menggambarkan situasi dan kondisi. Data bisa didapatkan dari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diperoleh melalui wawancara langsung

[55] Observasi Hari Kamis tanggal 14 September 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepada pihak yang bersangkutan, maupun dengan cara yang lain. Sumber data adalah subyek dari mana data diperoleh.[56] Kegiatan pengumpulan data merupakan hal yang sangat penting dalam penelitian kualitatif. Selain itu, perencanaan dalam teknik pengumpulan data juga dapat menentukan kualitas dari suatu penelitian. Hal ini bertujuan agar data yang diperoleh sesuai dengan permasalahan penelitian, sehingga tujuan penelitian dapat tercapai. Diperlukan beberapa sumber data untuk menggali kelengkapan data dalam penelitian ini, di antaranya yaitu:

1. Data Primer

   Data primer yaitu sumber data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian.[57] Sumber data primer dalam penelitian ini yaitu subyek penelitian yang dijadikan sebagai sumber informasi penelitian menggunakan metode wawancara, observasi, maupun dokumentasi. Sumber data primer didapatkan dari pengurus maupun anggota Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur.

2. Data Sekunder

   Data sekunder yaitu sumber data penunjang dan tambahan pada data utama yang relevan dengan judul dan ide pokok dalam permasalahan.[58] Sumber data sekunder dalam penelitian ini yaitu sumber data kedua sesudah sumber data primer. Selain digunakan sebagai data pelengkap, data sekunder akan sangat membantu apabila data primer sulit untuk

[56] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan dan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hal. 129.
[57] Anwar, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hal. 22.
[58] Sutrisno Hadi, *Metodologi Research II*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2002), hal.73.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diperoleh. Sumber data sekunder dalam penelitian ini berasal dari buku-buku atau kepustakaan, penelitian terdahulu yang dapat menunjang penelitian, internet, serta sumber-sumber lain yang berkaitan dengan subyek penelitian.

Untuk lebih mudah difahami, maka dapat ditabulasikan sebagai berikut.

Tabel 1.2 Data, sumber data, dan teknik pengambilan data.

No.	Data	Sumber data	Teknik pengambilan data
1.	Profil MUI Provinsi Jawa Timur.	a. Pimpinan b. Dokumen	Wawancara dan dokumentasi.
2.	Koordinasi kinerja yang dilakukan oleh MUI Provinsi Jawa Timur.	a. Pengurus b. Dokumen	Wawancara, dokumentasi, dan observasi.
3.	Cara mengembangkan dan memelihara hubungan baik diantara kegiatan-kegiatan baik fisik maupun rohaniah di MUI Provinsi Jawa Timur.	a. Pengurus b. Dokumen	Wawancara, dokumentasi, dan observasi.
4.	Waktu pelaksanaan koordinasi di MUI Provinsi Jawa Timur.	a. Pengurus b. Dokumen	Wawancara dokumentasi, dan observasi.
5.	Harmonisasi antar bagian-bagian saat bekerja di MUI Provinsi Jawa Timur.	a. Pengurus	Wawancara dokumentasi, dan observasi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6.	Pemberian informasi yang tepat mengenai bagian pekerjaan yang harus dikerjakan dalam tugas bersama di MUI Provinsi Jawa Timur.	a. Pengurus b. Dokumen	Wawancara, dokumentasi, dan observasi.
7.	Penyesuaian rencana kerja dari masing-masing bagian dengan keadaan di MUI Provinsi Jawa Timur.	a. Pengurus b. Dokumen	Wawancara dokumentasi, dan observasi.
8.	Penilaian pimpinan terkait koordinasi dalam masing-masing individu di MUI Provinsi Jawa Timur.	a. Pimpinan b. Pengurus	Wawancara dan observasi.
9.	Koordinasi antara individu-individu dari suatu kelompok di MUI Provinsi Jawa Timur.	a. Pengurus b. Dokumen	Wawancara, dokumentasi, dan observasi.
10	Koordinasi antara kelompok-kelompok di MUI Provinsi Jawa Timur.	a. Pengurus b. Dokumen	Wawancara, dokumentasi, dan observasi.
11.	Koordinasi antara MUI Provinsi Jawa Timur dengan MUI daerah.	a. Pengurus b. Dokumen	Wawancara, dokumentasi, dan observasi.
12.	Koordinasi MUI Provinsi Jawa Timur secara vertikal (struktural).	a. Pengurus b. Dokumen	Wawancara, dokumentasi, dan observasi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

13.	Koordinasi MUI Provinsi Jawa Timur secara horizontal (fungsional).	a. Pengurus b. Dokumen	Wawancara, dokumentasi, dan observasi.
14.	Koordinasi MUI Provinsi Jawa Timur secara diagonal.	a. Pengurus b. Dokumen	Wawancara, observasi, dan dokumentasi.
15.	Koordinasi MUI Provinsi Jawa Timur secara ekstern yang bersifat horizontal.	a. Pengurus b. Dokumen	Wawancara, observasi, dan dokumentasi.
16.	Koordinasi MUI Provinsi Jawa Timur secara ekstern yang bersifat diagonal.	a. Pengurus b. Dokumen	Wawancara, observasi, dan dokumentasi.
17.	Koordinasi MUI Provinsi Jawa Timur secara fungsional.	a. Pengurus b. Dokumen	Wawancara, observasi, dan dokumentasi.
18.	Koordinasi MUI Provinsi Jawa Timur secara instansional.	a. Pengurus b. Dokumen	Wawancara, observasi, dan dokumentasi.
19.	Koordinasi MUI Provinsi Jawa Timur secara teritorial.	a. Pengurus b. Dokumen	Wawancara, observasi, dan dokumentasi.
20.	Pentingnya koordinasi digunakan dalam MUI Provinsi Jawa Timur.	Pengurus	Wawancara, observasi, dan dokumentasi.
21.	Waktu penggunaan koordinasi dalam kinerja MUI Provinsi Jawa Timur.	a. Pengurus b. Dokumen	Wawancara, observasi, dan dokumentasi.
22.	Cara pimpinan	a. Pengurus	Wawancara, observasi, dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

	(manajer) dalam mencapai koordinasi yang baik dalam organisasi di MUI Provinsi Jawa Timur.	b. Dokumen	dokumentasi.
23.	Hubungan pribadi langsung diantara orang-orang yang bertanggung jawab di MUI Provinsi Jawa Timur dalam menjalankan koordinasi.	a. Pengurus b. Anggota	Wawancara, observasi, dan dokumentasi.
24.	Koordinasi yang dilakukan MUI Provinsi Jawa Timur pada tingkat-tingkat awal perencanaan dan pembuatan kebijaksanaan.	a. Pengurus b. Dokumen	Wawancara, observasi, dan dokumentasi.
25.	*Continueitas* koordinasi di MUI Provinsi Jawa Timur.	a. Pengurus b. Dokumen	Wawancara, observasi, dan dokumentasi.
26.	Dinamisme koordinasi di MUI Provinsi Jawa Timur.	a. Pengurus b. Dokumen	Wawancara, observasi, dan dokumentasi.
27.	Cara pemberitahuan yang efektif kepada kepala-kepala bagian untuk menghasilkan keselarasan tindakan.	a. Pengurus b. Dokumen	Wawancara, observasi, dan dokumentasi.
28.	Cara penyususnan kembali bagian-	a. Pengurus b. Dokumen	Wawancara, observasi, dan dokumentasi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

	bagian di MUI Provinsi Jawa Timur untuk memudahkan koordinasi yang efektif agar memiliki koordinasi yang lebih baik diantara kepala-kepala bagian.		
29.	Cara pimpinan mendefinisikan wewenang dan tanggung jawab yang jelas untuk masing-masing individu dan bagian di MUI Provinsi Jawa Timur.	a. Pengurus b. Dokumen	Wawancara, observasi, dan dokumentasi.
30.	Komunikasi yang dilakukan untuk menjalin koordinasi di MUI Provinsi Jawa Timur.	a. Pengurus b. Dokumen	Wawancara, observasi, dan dokumentasi.
31.	Faktor yang menghambat terjadinya komunikasi untuk menjalin koordinasi di MUI Provinsi Jawa Timur.	a. Pengurus b. Dokumen	Wawancara, observasi, dan dokumentasi.
32.	Model kepemimpinan dan supervisi yang dapat mempengaruhi suksesnya koordinasi di MUI Provinsi Jawa Timur.	a. Pengurus b. Dokumen	Wawancara, observasi, dan dokumentasi.
33.	Pihak-pihak yang	a. Pengurus b. Dokumen	Wawancara, observasi, dan dokumentasi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

	mempunyai wewenang untuk mengarahkan kegiatan-kegiatan pekerjaan dari individu-individu di MUI Provinsi Jawa Timur.		
34.	Cara individu-individu dalam melaksanakan wewenangnya di MUI Provinsi Jawa Timur.	a. Pengurus b. Dokumen	Wawancara, observasi, dan dokumentasi.
35.	Pengaruh kekuasaan terhadap koordinasi di MUI Provinsi Jawa Timur.	a. Pengurus b. Dokumen	Wawancara, observasi, dan dokumentasi.
36.	Jenis kekuasaan yang dapat mempengaruhi koordinasi di MUI Provinsi Jawa Timur.	a. Pengurus b. Dokumen	Wawancara, observasi, dan dokumentasi.
37.	Faktor-faktor yang dapat menyebabkan timbulnya kebutuhan koordinasi di MUI Provinsi Jawa Timur.	a. Pengurus b. Dokumen	Wawancara, observasi, dan dokumentasi.
38.	Faktor-faktor yang dapat menyebabkan timbulnya permasalahan atau menghambat koordinasi di MUI Provinsi	a. Pengurus b. Dokumen	Wawancara, observasi, dan dokumentasi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

	Jawa Timur.		
39.	Metode yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan koordinasi yang timbul di MUI Provinsi Jawa Timur.	a. Pengurus b. Dokumen	Wawancara, observasi, dan dokumentasi.
40.	Pendekatan, teknik, atau cara yang dilakukan untuk mencapai kooridinasi yang efektif di MUI Provinsi Jawa Timur.	a. Pengurus b. Dokumen	Wawancara, observasi, dan dokumentasi.

D. Tahap-tahap Penelitian

Tahap penelitian merupakan gambaran perencanaan keseluruhan penelitian, pengumpulan data, hingga laporan data. Menurut *Moleong* Tahap-tahap pelaksanaan ada tiga tahap yaitu, tahap sebelum ke lapangan (tahap pra lapangan), tahap pekerjaan lapangan, dan tahap analisis data.[59]

Dalam melakukan penelitian kualitatif perlu mengetahui tahap-tahap dalam proses penelitian. Untuk memperoleh data yang sistematis, maka tahapan ini disusun secara sistematis juga. Berikut tahapan-tahapan yang dilakukan dalam suatu penelitian:

1. Tahap pra-lapangan

   Ada beberapa hal yang perlu dilakukan oleh peneliti pada tahap pra-lapangan atau tahap penjajakan lapangan ini, di antaranya yaitu:

[59] Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), hal. 127.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Menyusun rancangan penelitian

Pada tahap ini, peneliti terlebih dahulu membuat permasalahan yang akan dijadikan sebagai obyek penelitian. Setelah itu peneliti membuat matriks untuk pengajuan judul. Kemudian peneliti membuat proposal penelitian yang sebelumnya didiskusikan dengan dosen pembimbing dan beberapa dosen lain serta mahasiswa. Setelah disetujui baru diseminarkan.

b. Memilih lapangan penelitian

Peneliti memilih Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur untuk dijadikan sebagai lokasi penelitian dalam penelitian ini.

c. Menjajaki dan menilai lapangan

Tahap ini dilakukan untuk memperoleh gambaran umum tentang keadaan yang ada di Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur.

d. Memilih dan memanfaatkan informan

Pada tahap ini, peneliti memilih beberapa informan yang merupakan orang yang benar-benar tahu dan terlibat dalam Rapat Kerja Daerah dan Program Bidang Fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur tahun 2017. Kemudian memanfaatkan informan tersebut dalam melakukan proses penelitian.

e. Menyiapkan perlengkapan penelitian

Pada tahap ini peneliti mempersiapkan segala sesuatu kebutuhan yang akan digunakan dalam penelitian.

f. Mengikuti ujian proposal dan mengurus surat izin penelitian.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Tahap lapangan

Beberapa hal yang perlu dilakukan pada tahapan ini di antaranya yaitu:

a. Memahami latar penelitian dan persiapan diri

Selain mempersiapkan diri, peneliti juga harus memahami latar penelitian agar dapat mengumpulkan model pengumpulan data.

b. Memasuki lapangan

Peneliti terjun langsung ke lokasi penelitian dan menjalin hubungan baik dengan subyek penelitian, dengan menggunakan tutur kata yang baik dan sopan. Selain itu juga perlu bergaul bersama mereka dengan tetap menjaga etika pergaulan dan norma-norma yang berlaku di lapangan penelitian tersebut.

c. Berperan serta sambil mengumpulkan data

Peneliti mencatat dan mengumpulkan data yang diperolehnya, baik dari wawancara, pengamatan, maupun menyaksikan sendiri kejadian tersebut.

d. Tahap analisis data

Patton menjelaskan bahwa, analisis data kualitatif merupakan proses mengurutkan data dan mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar.[60] Hal tersebut dapat memudahkan dalam menentukan tema. Pada tahap ini, peneliti menelaah semua data yang telah diperoleh dari berbagai sumber. Kemudian data-data tersebut dikumpulkan, diklasifikasi, dan dianalisa.

[60] Evi Martha dan Sudarti Kresno, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Untuk Bidang Kesehatan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), hal. 149.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Tahap penulisan laporan

Penulisan laporan yaitu hasil akhir dari suatu penelitian. Dalam tahap ini, peneliti mempunyai pengaruh terhadap hasil penulisan laporan. Peneliti menyusun laporan berdasarkan data atau informasi yang telah ditemukan dan dikumpulkan di lapangan. Kemudian laporan tersebut disusun sesuai dengan sistematika yang telah ditentukan. Penulisan laporan yang sesuai dengan prosedur penulisan yang baik akan menghasilkan kualitas penelitian yang baik pula.

E. Teknik Pengumpulan Data

Tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Jadi, teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian.[61] Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, sebagai berikut:

1. Pengamatan (observasi)

Pengamatan (observasi) yaitu proses peneliti dalam melihat situasi penelitian. Observasi merupakan pencatatan yang sistematis dan perekaman peristiwa, perilaku, dan benda-benda di lingkungan sosial tempat studi berlangsung.[62] Sutrisno Hadi mengemukakan bahwa, observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang

[61] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2015), hal. 224.

[62] Evi Martha dan Sudarti Kresno, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Untuk Bidang Kesehatan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), hal. 127.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis.[63] Beberapa informasi yang diperoleh dari hasil observasi adalah tempat, pelaku, kegiatan, objek, perbuatan, kejadian atau peristiwa. Pada penelitian ini, observasi dilakukan dengan mengamati kegiatan Rapat Kerja Daerah dan Program Bidang Fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur tahun 2017 secara langsung maupun melalui *website*.

2. Wawancara (*interview*)

   Wawancara (*interview*) yaitu metode pengumpulan data dengan jalan tanya jawab sepihak yang dilakukan dengan sistematis dan berlandaskan pada tujuan penelitian. Wawancara mendalam (*indepth interview*) adalah suatu jenis wawancara yang dilakukan untuk menggali informasi, memahami pandangan, kepercayaan, pengalaman, serta pengetahuan informan mengenai suatu hal secara utuh.[64] Teknik pengumpulan data ini berdasarkan pada laporan tentang diri sendiri (*self report*) atau setidak-tidaknya pada pengetahuan dan atau keyakinan pribadi.[65] Teknik ini dilakukan sebagai upaya untuk memperoleh informasi dari narasumber tentang koordinasi kinerja dalam Rapat Kerja Daerah dan Program BidangFatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur.

3. Dokumentasi

---

[63] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2015), hal. 145.

[64] Evi Martha dan Sudarti Kresno, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Untuk Bidang Kesehatan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), hal. 53.

[65] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2015), hal. 138.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subjek penelitian, akan tetapi melalui dokumen (buku-buku, surat kabar atau foto) maupun internet atau *website*.

F. Teknik Validitas Data

Teknik ini merupakan kemampuan menggambarkan temuan kebenaran. Hal ini bisa saja tidak tepat jika peneliti menerima kebenaran dengan begitu saja. Validitas data merupakan keabsahan suatu data. Validitas akan dinilai dengan keadaan yang terlihat dengan baik serta penggambaran yang tepat terhadap data yang dikumpulkan. Data yang telah dikumpulkan perlu diseleksi sebagai bahan masukan untuk manarik kesimpulan. Untuk memperoleh temuan serta interpretasi yang valid, maka perlu diteliti kredibilitasnya. Berikut beberapa cara yang dilakukan dalam proses validitas data:

1. Keikutsertaan peneliti di lapangan

   Peneliti yang menggunakan penelitian kualitatif ikut serta terjun langsung ke lapangan. Hal tersebut dilakukan untuk memperoleh data-data yang otentik. Dengan demikian, peneliti dapat mengamati secara langsung beragam peranan dari subyek-subyek yang ditelitimya. Dalam penelitian ini, peneliti ikut serta dalam Rapat Kerja Daerah tahun 2017 dan rapat Komisi Fatwa tahun 2017.

2. Diskusi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Peneliti mendiskusikan tentang permasalahan penelitian dengan pihak-pihak yang memiliki pandangan pengetahuan terkait permasalahan tersebut. Hal itu dilakukan setelah peneliti mengetahui data yang terkait dengan tema penelitian dan kendala yang dihadapi oleh Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur. Cara ini dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan solusi dari kendala yang dihadapi dalam koordinasi kinerja Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur.

3. Triangulasi

   Triangulasi bisa dilakukan dengan beberapa cara, diantaranya yaitu triangulasi kejujuran peneliti, triangulasi dengan sumber data, triangulasi dengan metode, dan triangulasi dengan teori.[66] Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi kejujuran peneliti, trianggulasi dengan sumber data, dan trianggulasi dengan metode. Triangulasi dengan metode yaitu pengecekan terhadap penggunaan metode pengumpulan data. Dengan demikian, maka peneliti dapat mengetahui apakah informasi tentang sistem koordinasi kinerja Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur yang diperoleh dengan wawancara sama dengan metode observasi maupun dengan dokumen.

4. Menggunakan data asli yang memadai dan sistematik yang dipresentasikan dari analisis. Dengan demikian, pembaca yakin bahwa interpretasi data terkait dengan data yang dikumpulkan.

[66] Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Edisi Kedua*, (Jakarta: Kencana, 2011), hal. 264.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

G. Teknik Analisis Data

Dalam pendekatan data atau analisis data, pendekatan kualitatif sangat berbeda dengan pendekatan kuantitatif. Data itu bisa dikumpulkan dalam aneka macam cara, seperti pengamatan terlibat, wawancara semi struktur, kemudian selanjutnya diproses melalui perekaman, pencatatan, serta pengetikan. Akan tetapi, dalam analisis kualitatif tetap menggunakan kata-kata yang bisa disusun ke dalam teks yang diperluas.

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam waktu tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan anlisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi sampai tahap tertentu, sehingga diperoleh data yang kredibel. Miles dan Huberman mengemukakan bahwa, aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas sehingga datanya sudah sampai pada titik jenuh.[67]

[67] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2015), hal. 246.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV
HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Obyek Penelitian

Berikut beberapa gambaran umum terkait obyek penelitian yang digunakan oleh peneliti:

1. Lokasi Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur

   Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur berada di Jl. Dharmahusada Selatan No. 5 Surabaya.[68]

2. Sejarah Berdirinya Majelis Ulama Indonesia

   Majelis Ulama Indonesia didirikan di Jakarta pada tanggal 17 Rajab 1395 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975 Masehi dalam pertemuan alim ulama. Pertemuan tersebut dihadiri oleh Majelis Ulama daerah, pimpinan ormas Islam tingkat nasional, pembina kerohanian dari empat angkatan (Angkatan Darat, Angakatan Udara, Angkatan Laut, dan Kepolisian Republik Indonesia), serta beberapa tokoh Islam yang hadir sebagai pribadi.

   Tanda berdirinya Majelis Ulama Indonesia diabadikan dalam bentuk penandatanganan piagam berdirinya Majelis Ulama Indonesia yang ditandatangani oleh 51 orang ulama. Ulama-ulama tersebut terdiri dari 26 orang ketua Majelis Ulama Daerah Tingkat Dati I se-Indonesia, 10 orang ulama dari unsur organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam

[68] Observasi Hari Kamis tanggal 14 September 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tingkat pusat, 4 orang ulama dari Dinas Rohani Islam AD, AU, AL, dan POLRI, serta 11 orang ulama yang hadir sebagai pribadi. Sepuluh ormas Islam tersebut yaitu Nahdlatul Ulama (NU) diwakili oleh KH. Moh. Dahlan, Muhamadiyah diwakili oleh Ir. H. Basit Wahid, Syarikat Islma (SI) diwakili oleh H. Syafi'i Wirakusumah, Persatuan Islam (PERTI) diwakili oleh H. Nur Hasan Ibnu Hajar, Al-Wsliyah diwakili oleh Anas Tanjung, Mathla'ul Anwar diwakili oleh KH. Saleh Su'aidi, Gabungan Usaha-Usaha Pengembangan Pendidikan Islam (GUPPI) diwakili oleh KH. S. Qudratullah, Pusat Pendidikan Tinggi Dakwah Islam (PTDI) diwakili oleh H. Sukarsono, Dewan Masjid Indonesia (DMI) diwakili oleh KH. Hasyim Adnan, dan Al-Ittihadiyah diwakili oleh H. Zaenal Arifin Abbas.

Pertemuan alim ulama yang melahirkan Majelis Ulama Indonesia tersebut ditetapkan sebagai MUNAS (Musyawarah Nasional) Majelis Ulama Indonesia pertama. Dengan demikian, kelahiran Majelis Ulama Indonesia tumbuh dari bawah sesuai aspirasi ulama di daerah.

Dalam acara pembukaan MUNAS Majelis Ulama Indonesia tanggal 21 Juli 1975 di Istana Negara, Presiden H. Soeharto, mengemukakan:

> Tugas Para Ulama adalah amar ma'ruf nahi munkar. Majelis Ulama Indonesia hendaknya menjadi penterjemah yang menyampaikan pikiran-pikiran dan kegiatan-kegiatan pembangunan nasional maupun pembanguan daerah kepada masyarakat. MUI hendaknya mendorong memberi arah dan menggerakkan masyarakat dalam membangun diri dan masa depannya. MUI hendaknya memberikan bahan-bahan pertimbangan mengenai kehidupan beragama kepada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> pemerintah. MUI hendaknya menjadi penghubung antara pemerontah dengan ulama.[69]

Kemudian dalam sambutannya Menteri Agama Prof. Dr. H. A. Mukti Ali menyatakan:

> Hari ini adalah berdirinya Majelis Ulama Indonesia, dan hari ini, di tempat ini, telah terkubur selama-lamanya iklim saling curiga mencurigai dan saling tidak percaya antara ulama dan umaro'. Pada hari ini dan di tempat ini pula telah didirikan tugu persatuan dan kesatuan serta ukhuwah Islamiyah diantara umat Islam di Indonesia. Oleh karena itu setelah berdirinya MUI ini, hendaknya selalu dicari jalan untuk menimbulkan iklim saling memerlukan. Iklim itu hendaknya terus diisi, dibina dan diratakan dengan kerja sama yang sebaik-baiknya untuk mengerjakan segala pekerjaan yang bermanfaat untuk kepentingan bangsa dan negara.[70]

Prof. Dr. Hamka, sebagai Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia pertama yang terpilih menyampaikan kata sambutannya, antara lain:

> Presiden kita menyatakan, bahwa ulama hidup di tengah-tengah rakyat. Apa yang beliau utarakan itu benar-benar dari segi manis dan pahitnya. Kadang-kadang benar-benar ulama terletak di tengah-tengah, laksana Kue bika yang sedang dimasak dalam periuk belanga. Dari bawah dinyalakan api; api yang dari bawah itu, ialah berbagai ragam keluhan rakyat. Dari atas dihimp dengan api; api dari atas itu, ialah harapan-harapan dari pemerintah supaya rakyat diinsyafkan dengan bahasa rakyat itu sendiri. Berat ke atas, niscaya putus dari bawah. Putus dari bawah niscaya berhenti jadi ulama yang didukung rakyat. Berat kepada rakyat, hilang hubungan dengan pemerintah, maksudnya tidak berhasil.[71]

Demikian antara lain cuplikan-cuplikan dari sambutan-sambutan di awal berdirinya Majelis Ulama Indonesia.

---

[69] Dokumentasi (*Pedoman Penyelenggaraan Organisasi Majelis Ulama Indonesia*, (Surabaya: Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur, 2013), Hal. 8).

[70] Dokumentasi (*Pedoman Penyelenggaraan Organisasi Majelis Ulama Indonesia*, (Surabaya: Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur, 2013), Hal. 8-9).

[71] Dokumentasi (*Pedoman Penyelenggaraan Organisasi Majelis Ulama Indonesia*, (Surabaya: Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur, 2013), Hal. 9).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Salinan Piagam Berdirinya Majelis Ulama Indonesia[72]

بسم الله الرحمن الرحيم

Bahwa:

ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير وياء مرون بالمعروف وينهون عن المنكروأولئك هم المفلحون

Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan orang yang menyeru kepada kebaikan, menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, merekalah orang-orang yang beruntung. (Q.S. Ali Imran: 104)

Bahwa:

العلماءورثة الأنبياء

Ulama adalah pewaris Nabi. (HR. Turmudzi, Abu Dawud, dan Ibn Majah)

Bahwa:

صنفان من الناس إذاصلحا صلح الناس وإذا فسدا فسد الناس, العلماء والأمراء

Dua golongan di antara manusia, bila keduanya baik, maka baiklah seluruh manusia, sedang bila keduanya rusak, maka rusak pulalah manusia yaitu Ulama dan Umaro. (Al-Hadits)

Bahwa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 ayat (1), para ulama berkewajiban membina umat Islam untuk lebih bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan turut serta memperkokoh Ketahanan Nasional serta melawan atheisme.

Bahwa berdasarkan Garis-Garis Bsar Haluan Negara ditetapkan, hakikat Pembangunan Nasional ialah pembangunan manusia seutuhnya, dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia suatu pembangunan yang seimbang, materil, spiritual, dunia akhirat. Oleh karena itu para ulama merasa bertanggung jawab untuk ikut serta mensukseskan pembangunan nasional.

Bahwa berdasarkan sejarah sejak zaman kolonial para ulama telah merintis adanya persatuan ulama; dan pada dewasa ini dirasa perlu adanya wadah persatuna para ulama seluruh Indonesia, untuk mewujudkan ukhuwah Islamiyah dalam rangka Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa Indonesia.

Bahwa dengan mengingat:

1. Amanat Bapak Presiden pada Pembukaan Musyawarah Nasional I Majelis Ulama se Indonesia pada tanggal 21 Juli 1975;
2. Ceramah-ceramah Ketua MPR/DPR, Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, Menteri HAMKAM, Menteri Penerangan, Menteri Negara EKUIN/ Ketua BAPPENAS, Wakil Kepala BAKIN dan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah;
3. Pendapat-pendapat para peserta Musyawarah Nasional I Majelis Ulama tanggal 21 s/d 27 Juli 1975.

Maka dengan rahmat Allah SWT.

[72] Dokumentasi Hari Senin tanggal 23 Oktober 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Musyawarah Nasional I Majelis Ulama menyatakan berdirinya :

MAJELIS ULAMA INDONESIA

Pada tanggal 17 Rajab 1395 H. bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975 dengan menetapkan pedoman pokok, susunan pengurus, pedoman kerja dan saran-saran umum sebagaimana tercantum dalam lampiran-lampiran I, II, III, dan IV Piagam ini.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 17 Rajab 1395 H
26 Juli 1975 M

MUSYAWARAH NASIONAL I MAJELIS ULAMA INDONESIA

1.	D.K.I. Jakarta	: H. Rahmatullah Shiddiq	Ttd.
2.	Jawa Barat	: A.K. Basuni	Ttd.
3.	Jawa Tengah	: Prof. T. H. Ismail Yakub	Ttd.
4.	D.I. Yogyakarta	: H. BPH. Prabuningrat	Ttd.
5.	Jawa Timur	: H. M. Maskoen	Ttd.
6.	D. I. Aceh	: H. Ali Hasymy	Ttd.
7.	Sumatra Utara	: H. Ismail Sulaiman	Ttd.
8.	Sumatra Barat Kayo	: H. Mansour Dawoed Datuk Palimo	Ttd.
9.	Riau	: Drs. Said Abdurrahman	Ttd.
10.	Jambi	: M. O. Bafadhol	Ttd.
11.	Bengkulu	: Drs. K. H. Yusuf Aziz	Ttd.
12.	Sumatera Selatan	: K. H. Masyhur Azhari	Ttd.
13.	Lampung	: Drs. H. Soewarno Achmady	Ttd.
14.	Kalimantan Barat	: Drs. H. Moh. Ardani	Ttd.
15.	Kalimantan Tengah	: H. M. Imron Yusuf	Ttd.
16.	Kalimantan Selatan	: Muchtarum, SH	Ttd.
17.	Kalimantan Timur	: KHM. Saberani T.Y	Ttd.
18.	Sulawesi Utara	: K. H. Yoesoef Ontowiryo	Ttd.
19.	Sulawesi Tengah	: K. A. Muthalib Thohir	Ttd.
20.	Sulawesi Tenggara	: K. H. Baedhawie	Ttd.
21.	Sulawesi Selatan	: H. M. Ali Mabham D.T.	Ttd.
22.	Maluku	: H.M.K. Soulisa	Ttd.
23.	Irian Jaya	: Abdulmu'in Yasin	Ttd.
24.	Bali	: H. Machrus Usman	Ttd.
25.	Nusa Tenggara Barat	: H. Nuruddin	Ttd.
26.	Nusa Tenggara Timur	: H.O.S. Badjibaeh	Ttd.
27.	N.U.	: KH. Moh. Dahlan	Ttd.
28.	Muhammadiyah	: Ir. H. Basit Wahid	Ttd.
29.	Syarikat Islam	: H.M. Syafii Wirakusumah	Ttd.
30.	Perti	: Nurhasan Ibnu Hajar	Ttd.
31.	Al-Washliyah	: Anas Tanjung	Ttd.
32.	Mathlaul Anwar	: K. H. Saleh Su'aidi	Ttd.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

33.	GUPPI	: K.H. Kudratullah	Ttd.
34.	P.T.D.I	: H. Sukarsono	Ttd.
35.	Dewan Masjid	: H.M. Hasyim Adnan	Ttd.
36.	Al-Ittihadiyah	: H. Zaenal Arifin Abbas	Ttd.
37.	Disrohis A.D	: H. A. Soleiman	Ttd.
38.	Disrohis A.U	: Drs. Nawawi Rambe	Ttd.
39.	Disrohis A.L	: Drs. D.K. Djamhari	Ttd.
40.	Disrohis POLRI	: Drs. H. Abdullah Usman	Ttd.
41.	Perorangan	: Prof. Dr. Hamka	Ttd.
42.	Perorangan	: K.H. Thohir Rohili	Ttd.
43.	Perorangan	: K.H. Sapari	Ttd.
44.	Perorangan	: K.H. Abdullah Syafi'i	Ttd.
45.	Perorangan	: K.H. Rusli Khalil	Ttd.
46.	Perorangan	: K.H. Adul Aziz	Ttd.
47.	Perorangan	: Muchtar Luthfi Elansory	Ttd.
48.	Perorangan	: A.K. Basuni	Ttd.
49.	Perorangan	: Tgk. H. Abullah Udjong Rimba	Ttd.
50.	Perorangan	: Prof. Mr. Kasman Singodimedjo	Ttd.
51.	Perorangan	: K.H. Hasan Basri	Ttd.

4. Latar Belakang Didirikannya Majelis Ulama Indonesia

Beberapa alasan atau latar belakang didirikannya Majelis Ulama Indonesia antara lain adalah:[73]

a. Di berbagai negara, terutama di Asia Tenggara, ketika itu telah terbentuk Dewan Ulama atau Majelis Ulama atau Mufti selaku penasehat tertinggi di bidang keagamaan yang memiliki peran strategis.

b. Sebagai lembaga atau "alamat" yang mewakili umat Islam Indonesia kalau ada pertemuan-pertemuan ulama internasional, atau bila ada

[73] Dokumentasi (*Pedoman Penyelenggaraan Organisasi Majelis Ulama Indonesia*, (Surabaya: Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur, 2013), Hal. 9-10) dan wawancara dengan sekretaris umum Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur pada Hari Kamis tanggal 25 Januari 2108.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tamu dari luar negeri yang ingin bertukar fikiran dengan ulama Indonesia.

c. Untuk membantu pemerintah dalam memberikan pertimbangan-pertimbangan keagamaan dalam menyukseskan program pembangunan, serta sebagai jembatan penghubung (penerjemah) komunikasi antara umara dan umat Islam.

d. Sebagai wadah pertemuan dan silaturahmi ulama seluruh Indonesia untuk mewujudkan ukhuwah Islamiyah.

e. Sebagi wadah musyawarah bagi para ulama, zu'ama, dan cendekiawan muslim Indonesia untuk membicarakan permasalahan umat.

5. Visi dan Misi Majelis Ulama Indonesia

Visi dan misi Majelis Ulama Indonesia yaitu sebagai berikut:[74]

a. Visi Majelis Ulama Indonesia

1) Terciptanya kondisi kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan yang baik.

2) Memperoleh ridlo dan ampunan Allah Subhanahu Wata'ala (*baldatun thoyyibatun wa robbun ghofur*) menuju masyarakat berkualitas (*khaira ummah*), demi terwujudnya kejayaan Islam dan kaum muslimin (*izzul Islam wal muslimin*) dalam wadah

[74] Dokumentasi (*Himpunan Keputusan Musyawarah Nasional IX Majelis Ulama Indonesia Tahun 2015*, (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2015), Hal. 9).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai manifestasi dari rahmat bagi seluruh alam (*rahmatan lil 'alamin*).

b. Misi Majelis Ulama Indonesia

1) Menggerakkan kepemimpinan dan kelembagaan umat secara efektif dengan menjadikan ulama sebagai panutan (*qudwah hasanah*), sehingga mampu mengarahkan dan membina umat Islam dalam menanamkan dan memupuk aqidah Islamiyah, serta menjalankan syari'ah Islamiyah.
2) Melaksanakan dakwah Islam, *'amar ma'ruf nahi munkar* dalam mengembangkan *akhlaqul karimah*, agar terwujudnya masyarakat berkualitas (*khaira ummah*) dalam berbagai aspek kehidupan.
3) Mengembangkan ukhuwah Islamiyah dan kebersamaan, dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan umat Islam dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Orientasi Majelis Ulama Indonesia

Majelis Ulama Indonesia mempunyai sembilan orientasi perkhidmatan, yaitu:[75]

a. Diniyah

Majelis Ulama Indonesia merupakan wadah perkhidmatan yang mendasari semua langkah dan kegiatannya pada nilai dan ajaran Islam yang *kaffah*.

[75] Dokumentasi (*Pedoman Penyelenggaraan Organisasi Majelis Ulama Indonesia*, (Surabaya: Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur, 2013), Hal. 20-21).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. *Irsyadiyah*

Majelis Ulama Indonesia merupakan wadah perkhidmatan dakwah *wal irsyad*, yaitu upaya untuk mengajak umat manusia kepada kebaikan serta melaksanakan *amar ma'ruf nahi munkar* dalam arti seluas-luasnya. Setiap kegiatan Majelis Ulama Indonesia dimaksudkan untuk dakwah dan dirancang untuk selalu berdimensi dakwah.

c. *Istijabiyah*

Majelis Ulama Indonesia merupakan wadah perkhidmatan yang berorientasi *istijabiyah*, senantiasa memberikan jawaban positif dan responsif terhadap setiap permasalahan yang dihadapi masyarakat melaluiprakarsa-prakarsa kebijakan (amal saleh) dalam semangat berlomba untuk kebaikan (*fastabiq al-khoirot*).

d. *Hurriyah*

Majelis Ulama Indonesia merupakan wadah perkhidmatan independen yang bebas dan merdeka serta tidak tergantung maupun terpengaruh oleh pihak-pihak lain dalam mengambil keputusan, mengeluarkan pikiran, pandangan, dan pendapat.

e. *Ta'awuniyah*

Majelis Ulama Indonesia merupakan wadah perkhidmatan yang mendasari diri pada semangat tolong-menolong untuk kebaikan dan ketaqwaan dalam membela kaum dhuafa untuk meningkatkan harkat dan martabat serta derajat kehidupan masyarakat. Semangat ini

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilaksanakan atas dasar persaudaraan di kalangan seluruh lapisan golongan umat Islam (*ukhuwah Islamiyah*). Ukhuwah Islamiyah ini merupakan landasan bagi Majelis Ulama Indonesia untuk mengembangkan persaudaraan kebangsaan (*ukhuwah wathaniyah*) dan memperkokoh persaudaraan kemanusiaan (*ukhuwah basyariyyah*).

f. Syuriyah

Majelis Ulama Indonesia merupakan wadah perkhidmatan yang menekankan prinsip musyawarah dalam mencapai permufakatan melalui pengembangan sikap demokratis, akomodatif, dan aspiratif terhadap berbagai aspirasi yang tumbuh dan berkembang di masyarakat.

g. Tasamuh

Majelis Ulama Indonesia merupakan wadah perkhidmatan yang mengembangkan sikap toleransi dan moderat dalam menghadapi masalah-masalah khilafiyah.

h. Qudwah

Majelis Ulama Indonesia merupakan wadah perkhidmatan yang mengedepankan kepeloporan dan keteladanan melalui prakarsa-prakarsa kebijakan yang bersifat perintisan untuk kemaslahatan umat.

i. Addualiyah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Majelis Ulama Indonesia merupakan wadah perkhidmatan yang menyadari dirinya sebagai anggota masyarakat dunia yang ikut aktif memperjuangkan perdamaian yang sesuai dengan ajaran Islam.

7. Peranan Majelis Ulama Indonesia

Berdasarkan jati diri ulama sebagai *waratsat al-anbiyaa*, maka Majelis Ulama Indonesia mempunyai peran sebagai berikut:

a. Sebagai ahli waris tugas para nabi (*waratsat al-anbiyaa*)

Majelis Ulama Indonesia berperan sebagai ahli waris tugas-tugas para nabi, yaitu menyebarkan ajaran Islam serta memperjuangkan terwujudnya suatu kehidupan sehari-hari secara arif dan bijaksana berdasarkan Islam. Sebagai *waratsatu al-anbiyaa* (ahli waris tugas-tugas para nabi), Majelis Ulama Indonesia menjalankan fungsi kenabian (*al-nubuwwah*) yakni memperjuangkan perubahan kehidupan agar berjalan sesuai ajaran Islam, walaupun dengan konsekuensi akan menerima kritik, tekanan, dan ancaman karena perjuangannya bertentangan dengan sebagian tradisi, budaya, dan peradaban manusia.

b. Sebagai pemberi fatwa

Majelis Ulama Indonesia berperan sebagai pemberi fatwa bagi umat Islam, baik diminta maupun tidak diminta. Sebagai lembaga pemberi fatwa, Majelis Ulama Indonesia megakomodasikan dan menyalurkan aspirasi umat Islam Indonesia yang sangat bergam aliran, paham, dan pemikiran serta organisasi keagamaannya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Sebagai pembimbing dan pelayan umat (*ra'iy wa khadim al ummah*)

Majelis Ulama Indonesia berperan sebagai pelayan umat (*khadim al-ummah*), yaitu melayani umat dan bangsa dalam memenuhi harapan, aspirasi, dan tuntutan mereka. Dalam kaitan ini, Majelis Ulama Indonesia senantiasa berikhtiar memenuhi permintaan umat, baik langsung maupun tidak langsung, akan bimbingan dan fatwa keagamaan. Begitu pula Majelis Ulama Indonesia berusaha selalu tampil di depan, dalam membela dan memperjuangkan aspirasi umat dan bangsa dalam hubungannya dengan pemerintah.

d. Sebagai penegak amar ma'ruf dan nahi munkar

Majelis Ulama Indonesia berperan sebagai penegak amar ma'ruf nahi munkar yaitu dengan menegaskan kebenaran sebagai kebenaran dan kebatilan sebagai kebatilan dengan penuh hikmah dan istiqomah. Dengan demikian, Majelis Ulama Indonesia juga merupakan wadah perkhidmatan bagi pejuang dakwah (mujahid dakwah) yang senantiasa merubah bangsa dari kondisi yang tidak sejalan dengan ajaran Islam menjadi masyarakat dan bangsa yang berkualitas (*khairu ummah*).

e. Sebagai pelopor gerakan *tajdid*

Majelis Ulama Indonesia berperan sebagai pelopor *tajdid,* yaitu gerakan pemurnian (*tashfiyah*) dan dinamisasi (*tathwir*) pemikiran Islam.

f. Sebagai pelopor gerakan perbaikan umat (*ishlah al-ummah*)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Majelis Ulama Indonesia berperan sebagai pelopor perbaikan umat (*ishlah al-ummah*) yang meliputi:

1) Sebagai pendamai terhadap perbedaan pendapat dan gerakan yang terjadi di kalangan umat. Apabila terjadi perbedaan pendapat di kalangan umat Islam maka Majelis Ulama Indonesia dapat menempuh jalan *al-jam'u wa al-tawfiq* (kompromi dan penyesuaian) dan *tarjih* (mencari hukum yang lebih kuat). Dengan demikian diharapkan tetpa terpelihara semangat persaudaraan (ukhuwah) di kalangan umat Islam Indonesia.
2) Sebagai pelopor perbaikan umat (*ishlah al-ummah*) dengan cara:
   a) Membina dan memelihara kehidupan umat (*himayah al-ummah*), terutama dalam aqidah, syari'ah, dan akhlak.
   b) Penguatan pemberdayaan kehidupan umat (*taqwiyah al-ummah*).
   c) Berusaha terus-menerus menyatukan umat (*tauhid al-ummah*).

g. Sebagai pengemban kepemimpinan umat (*qiyadah al-ummah*)

Majelis Ulama Indonesia sebagai elemen bangsa Indonesia ikut bertanggung jawab atas maju mundurnya kehidupan bangsa (*syirkatu al-mas'uliyyah*) terutama dalam hal terciptanya kerukunan kehidupan umat beragama, perbaikan akhlak bangsa, dan pemberdayaan umat Islam dalam semua segi kehidupan. Maka Majelis Ulama Indonesia perlu ikut berperan sebagai pengemban kepemimpinan umat (*qiyadah al-ummah*) secara kelembagaan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

8. Hubungan Majelis Ulama Indonesia dengan pihak luar.

Sebagai badan hukum yang dilahirkan oleh para ulama, zuama, dan cendekiawan muslim serta tumbuh berkembang di kalangan umat Islam, Majelis Ulama Indonesia adalah gerakan masyarakat. Dalam hal ini, Majelis Ulama Indonesia tidak berbeda dengan organisasi kemasyarakatan lain di kalangan umat Islam, yang memiliki keberadaan otonom dan menjunjung tinggi semangat kemandirian. Semangat ini ditampilkan dalam kemandirian, dalam arti tidak tergantung dan terpengaruh kepada pihak lain di luar dirinya dalam mengeluarkan pandangan, pikiran, sikap, dan mengambil keputusan atas nama organisasi.

Dalam kaitan dengan organisasi-organisasi kemasyarakatan di kalangan umat Islam, Majelis Ulama Indonesia tidak bermaksud untuk menjadi organisasi yang membawahi organisasi-organisasi kemasyarakatan tersebut, dan apalagi memposisikan dirinya sebagai wadah tunggal yang mewakili kemajemukan dan keragaman umat Islam. Majelis Ulama Indonesia merupakan wadah silaturahim ulama, zuama, dan cendekiawan muslim dari berbagai kelompok di kalangan umat Islam.

Namun perlu ditegaskan bahwa, kemandirian tidak berarti menghalangi Majelis Ulama Indonesia untuk menjalin hubungan dan kerja sama dengan pihak lain, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, selama dijalankan atas dasar saling menghargai posisi masing-masing

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

serta tidak menyimpang dari visi, misi, dan fungsi Majelis Ulama Indonesia. Hubungan dan kerja sama itu menunjukkan kesadaran Majelis Ulama Indonesia bahwa, dirinya hidup dalam tatanan kehidupan bangsa yang sangat beragam, dimana dirinya menjadi bagian utuh dari tatanan tersebut yang harus hidup berdampingan dan bekerjasama antar komponen bangsa, untuk kebaikan dan kemajuan bangsa. Sikap Majelis Ulama Indonesia ini menjadi salah satu ikhtiar untuk mewujudkan Islam sebagai *rahmatan lil 'alamin*.

9. Hubungan kerja Majelis Ulama Indonesia

Berikut beberapa hubungan kerja yang diadakan oleh Majelis Ulama Indonesia:

a. Majelis Ulama Indonesia mengadakan kerja sama dalam kebajikan dan takwa dengan pemerintah dan mengadakan konsultasi serta pertukaran informasi secara timbal balik.
b. Majelis Ulama Indonesia mengadakan kerja sama dengan tokoh-tokoh masyarakat, ulama, zuama, organisasi/lembaga Islam dalam memberikan bimbingan dan tuntunan serta pengayoman kepada masyarakat khususnya umat Islam, serta mengadakan konsultasi dan pertukaran informasi secara timbal balik.
c. Majelis Ulama Indonesia mengadakan kerja sama dengan organisasi dan lembaga lainnya dalam mencapai tujuan dan usaha Majelis Ulama Indonesia.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Majelis Ulama Indonesia tidak berafiliasi kepada salah satu organisasi politik dan/atau organisasi kemasyarakatan.

10. Susunan Organisasi Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur

Berikut susunan organisasi Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur:[76]

Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (DP MUI)

Provinsi Jawa Timur Masa Khidmah 2015-2020

Yang Disempurnakan/Penggantian Antar Waktu

I. Dewan Pertimbangan

Ketua : Dr. H. Soekarwo, M. Hum.

Wakil ketua : Drs. H. Saifullah Yusuf

Wakil ketua : Drs. Syamsul Bahri, M. Pd. I.

Wakil ketua : Prof. Dr. H. M. Ridlwan Nasir, MA.

Wakil ketua : Dr. KH. Saad Ibrahim, MA.

Sekretaris : Drs. Nurcholis Huda, M. Si.

Wakil sekretaris : Drs. H. Abdul Wahib El Ghoni

Anggota :
1. KH. Dr. (Hc) Ir. Sholahuddin Wahid
2. KH. Anwar Mansur
3. KH. Hasan Mutawakkil Alallah, SH., MM.
4. Drs. H. Mahfudh Shodar, M. Ag.
5. KH. Nawawi Abdul Jalil
6. KH. Hasan Abdullah Sahal

[76] Dokumentasi Hari Jumat tanggal 6 Oktober 2017..

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7. KH. Basori Alwi Murtadla
8. KH. Sholeh Qasim
9. KH. Jamaluddin Ahmad
10. KH. Zainuddin Jazuli
11. KH. Ubaidillah Faqih
12. Drs. H. M. Roziqi, MM.
13. Drs. K. H. Imam Haromain Asy'ari, M. Si.
14. H. M. Asyikin, SH., M.Si.
15. H. Tamat Anshori Ismail
16. Drs. H. Ahmad Busyairi Mansur
17. Prof. Dr. H. Ali Mufrodi, MA.
18. Al-Habib Ahmad bin Zein al-Kaff
19. Dr. H. Gentur Prihantono

II. Dewan Pimpinan Harian

Ketua umum : KH. Abdusshomad Buchori

Ketua : KH. Abdurrahman Navis, Lc., M.HI.

Ketua : KH. Hasyim Abbas, M.HI.

Ketua : KH. Nuruddin Abdurrahman, SH.

Ketua : Prof. Dr. KH. A. Faishol Haq, M.Ag.

Ketua : Dr. H. M. sudjak, M.Ag.

Ketua : Prof. Dr. KH. Abdul Halim Soebahar, MA.

Ketua : Prof. Dr. H. Thohir Luth, MA.

Ketua : Dr. KH. A. Muhammad Tidjani

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ketua : Ir. H. Chaerul Djaelani, M.MT.

Ketua : Drs. KH. Abdurrachman Aziz, M.Si.

Ketua : Dra. Hj. Udji Asiyah, M.Si.

Sekretaris umum : Ainul Yaqin, S.Si., M.Si., Apt.

Sekretaris : Mochammad Yunus, S.IP., M.Pd.I.

Sekretaris : H. A. Budiono, SH., CN.

Sekretaris : Drs. H. Abdul Mujib Hasyim

Sekretaris : Drs. H. Moh. Masduqi, SH.

Sekretaris : Amanulloh, S.Ag., M.HI.

Sekretaris : Dra. Hj. Faridatul Hanum, M.Com.I

Bendahara umum : Drs. H. saifuddin Zaini, M.Pd.I

Bendahara : Drs. H. M. Yasin Tatisina

Bendahara : H. Mustofa Bawazier, SE.

Bendahara : Hj. Sukiyati, S.Ag.

Bendahara : Ahmad Arif Fahmi.

Susunan Personalia Dewan Pakar Dan Komisi-Komisi Dewan Pimpinan

Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur

Masa Khidmat Tahun 2015-2020

Yang disempurnakan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

I. Dewan Pakar

1. Dr. KH. Asep Saifuddin Halim
2. Prof. Dr. Ir. H. Mohammad Nuh, DEA.
3. dr. H. Muhammad Thohir, Sp.KJ.
4. Prof. Dr. KH. M. Ali Aziz, M.Ag.
5. Prof. Dr. Hj. Istibsyaroh, M.A.
6. Prof. Mahmud Zaki, MSc.
7. Prof. Dr. Ir. H. Achmad Jazidie, M.Eng.
8. Prof. Dr. H. Sugijanto, MS. Apt.
9. Prof. Dr. H. Mohammad Nasih
10. H. Hamid Fahmi Zarkasyi, MA., M.Phill., Ph.D
11. Prof. Dr. H. ali Mas'ud Khalqillah, M.Ag., M.Pd.
12. Dr. KH. Abdullah Syamsul Arifin, MHI.
13. Prof. Dr. H. A. Haris, M.Ag.
14. Drs. Ec. H. Suherman Rosyidi, G.Dip., M.Com.
15. Prof. Dr. H. Aminudin Kasdi
16. Dr. Hj. Mihmidati Ya'qub, M.Ag.
17. Dr. Syaiful Rachman, MM., MPd.
18. Drs. H. Endro Siswantoro, M.Si.
19. Drs. H. Hamid Syarif, M.Hum.
20. Dr. (HC) Ir. H. Abdulkadir Baraja
21. Prof. Dr. H. Nizarul Alim
22. Dr. H. Kasno Sudaryanto, M.Ag.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

23. Dr. Ir. H. Miftahul Huda, MM.
24. Dra. Hj. Masruroh Wahid, M.Si.
25. H. R. Soeroso, SE., MM.
26. Drs. H. Ismail Nachu
27. Dr. H. Achmad Muhibbin Zuhri, MA.
28. Drs. H. Muhammad Taufiq AB
29. Dra. Hj. Siti Dalilah Candrawati, M.Ag.
30. Ir. H. Chriswanto Santoso, M.Sc
31. dr. H. Abdul Ghafir, Sp.PD
32. dr. Ir. Wahid Wahyudi, MT.
33. Dr. Ir. Hary Sugiri, M.BA.
34. Dr. Dr. H. Sukadiono, MM.

II. Komisi-Komisi

1. Komisi Fatwa

Ketua	: Drs. KH. Hasyim Abbas, M.HI.
Wakil ketua	: KH. Ahmad Dzulhilmi Ghozali
Sekretaris	: KH. Ahmad Asyar Shofwan, M.Pd.I.
Wakil sekretaris	: Drs. H. Wasmukan, M.Ag.
Anggota	: 1. Dr. KH. Abd. Salam Nawawi, M.Ag.
	2. KH. Fahd Abdurrahman
	3. H. Abdul Choliq, Lc., M.HI
	4. H. Ahmad Mudzoffar Jufri, Lc., MA.
	5. Dr. Syamsuddin, M.Ag.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Komisi Ukhuwah Islamiyah dan Hubungan antar Umat Beragama

Ketua : Drs. H. Muhaimin Ali

Wakil ketua : Sudarno Hadi, S.Ag., M.Pd.

Sekretaris : Akbar Muzakki

Wakil sekretaris : Muhammad Yoto, S.K.M., M.Kes.

Anggota : 1. H. Ady Amar

2. KH. Fahrurrozi Kholili

3. Ir. H. Tahmid Masyhudi, M.Si.

4. KH. Khoiruddin Hilimi, S.Ag.

5. Atho' Maftuh, S.Ag.

6. Drs. H. Ilhamullah Sumarkan, M.Ag.

7. Mohammad Arif, S.Ag.

3. Komisi Dakwah, Pengembangan Masyarakat, dan Hubungan Luar Negeri

Ketua : Drs. KH. A. Fauzi Afandi

Wakil ketua : KH. Imam Mawardi, S.Pd.

Sekretaris : Nur Fauzi, S.Hum., M.Pd.

Wakil sekretaris : Nur Holis Majid, S.HI., M.HI.

Anggota : 1. KH. Abdul Hamid Abdullah, SH., M.Si

2. KH. Muhammad Sholeh Drehem, Lc. M.Ag.

3. KH. Syukron Jazilan, M.Ag.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. KH. Abdurrohim Dzulqarnain
5. Dr. H. Saiful Jazil, M.Ag.
6. KH. Khoiron Syuaib
7. dr. Sulis Bayu Sentono, M.Kes., Sp.OT.

4. Komisi Pendidikan, Kaderisasi, dan Pembinaan Seni Budaya

Ketua : Drs. H. Chusnul Marom, M.HI.

Wakil ketua : Dr. H. Mahsun, M.Ag.

Sekretaris : H. Samsul Anam, S.Ag., M.Pd.I.

Wakil sekretaris : Dian Berkah, MHI.

Anggota : 1. H. M. Nasor, SH., MM.
2. Dr. H. Triyanto, M.Pd.
3. Drs. H. Syamsuri, M.Pd.
4. H. Masruri, M.Pd.
5. M. Zainuddin Alanshori, SHI., MHI.
6. Silvya Nuryani, S.Ag.

5. Komisi Pengkajian dan Penelitian

Ketua : Prof. Dr. H. Aswadi, M.Ag

Wakil ketua : Dr. H. Ulul Albab

Sekretaris : A. Kholili Hasib, M.A.

Wakil sekretaris : Muhammad Abdul Ilah, S.Ag., M.Pd.I.

Anggota : 1. KH. M. Junaidi Sahal
2. H. Shofiyullah,ST., M.Ag.
3. Drs. Marni Mulyana, Lc., M.HI.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Drs. H. Marfa'i Shobar

5. Ahmad Syihab Fahmi, S.TP., M.Si.

6. Komisi Hukum dan Perundang-undangan

Ketua : H. Agung Supangkat, SH., MH.

Wakil ketua : Dr. H. Moh. Fauzie Said, M.Si.

Sekretaris : Gianto Ali Imron, SH., M.H.

Wakil sekretaris : H. Ma'ruf Syah, SH., M.H.

Anggota : 1. H. Ali Usman Karim, SH., M.Hum.

2. Kombespol Kusmidi

3. H. Abu Bakar Assegaf, SH.

7. Komisi Pengembangan Dana Umat dan Penguatan Keuangan

Ketua : H. Ubaidillah Nurdin, SE.

Wakil ketua : Hj. Balqis Nur Majmun, M.Si.

Sekretaris : H. Bakhtiar Rosyaduddin, S.Ag., M.Si.

Wakil sekretaris : H. Muhaamd Abdduh Muizzuddin, S.Psi., M.M.

Anggota : 1. Muhammad Ali Afandi, SE.

2. H. Rahmadi Yogiantoro, ST.

3. Dra. Hj. Siti Syamsiyah

4. Ditto Widyanti, ST.

5. Faisal Riza, SE.

8. Komisi Pemberdayaan Ekonomi dan Pengembangan Ekonomi Syari'ah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ketua : Dr. H. Khoirul Anwar, M.EI.

Wakil ketua : H. Abdul Majid Umar

Sekretaris : Sa'dullah Syarofi, S.Ag., M.Si.

Wakil sekretaris : Nanang Qosim, SE., M.PI.

Anggota : 1. Ir. H. Suharjupri, M.Si.

2. Sukamto, M.EI.

3. M. Jakfar, M.HI.

4. Ahmad Habibi Kurniawan, SE., MM.

9. Komisi Pemberdayaan Perempuan, Keluarga, dan Remaja

Ketua : Dra. Hj. Salimah Hadi

Wakil ketua : Dra. Ilun Muallifah, M.Pd.

Sekretaris : Dra. Hj. Dewi Hajar Mastrim, M.Pd.I.

Wakil sekretaris : Sari Agustiani, S.Ag., M.Pd.I.

Anggota : 1. Yulia Istianah, M.Si.

2. R. Alvy Khoiriyah, S.TP., M.Si.

3. Luluk Asfiyah, M.Pd.

4. Hj. Lilik Fatmawati, S.TP., M.AP.

10. Komisi Hubungan Ulama Umara

Ketua : Drs. KH. Abdul Mutholib, AM., MM.

Wakil ketua : Drs. KH. Hidayatullah, M.Si.

Sekretaris : Drs. H. Muhammad Ersyad, M.HI.

Wakil sekretaris : H. Ali Zuhdi, SH.

Anggota : 1. Mohammad Isa, M.Si.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Drs. H. Suyuthi Misbach, Lc.

3. H. Sudarto

11. Komisi Informasi dan Komunikasi

Ketua : Ahmad Kholis, S.Sos.

Wakil ketua : Drs. H. Zainuddin Qodir

Sekretaris : M. Sudjowadi, ST.

Wakil sekretaris : Muhammad Subhan

Anggota : 1. Drs. Samsul Arifin, MM.

2. H. Abdul Choliq, S.Ag., S.Th.I.

3. Drs. H. Saiful Islam Ali

4. Drs. Supriyana

11. Program Kerja Majelis Ulama Indonesia

Secara umum atau garis besar, program Majelis Ulama Indonesia dapat dibedakan ke dalam tiga kategori, yaitu program umum, program prioritas (unggulan), dan program rintisan (*pilot project*). Dalam penelitian ini, peneliti akan menjelaskan program umum sebagai berikut:

a. Program Umum

Program umum merupakan program untuk jangka waktu lima tahun sebagai pedoman perumusan program tahunan dalam Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS). Rapat ini dilaksanakan oleh Majelis Ulama Indonesia dan dapat dijadikan acuan bagi penetapan program Majelis Ulama Indonesia daerah (Majelis Ulama Indonesia provinsi dan kabupaten/kota). jika di Pusat disebut dengan Rapat Kerja

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nasional (RAKERNAS), maka di provinsi disebut dengan Rapat Kerja Daerah (RAKERDA).

Program umum disusun oleh Majelis Ulama Indonesia berdasarkan ruang lingkup program dari Garis-Garis Besar Program Majelis Ulama Indonesia baik pusat maupun daerah. Agar program umum dapat terukur, maka harus dicantumkan indikator keberhasilan serta alokasi sumber daya yang diperlukan dan target waktu yang dibutuhkan.

Lingkup program Majelis Ulama Indonesia berorientasi pada substansi kegiatan yang dikelompokkan ke dalam 12 bidang sebagai berikut:

1) Program Bidang Fatwa
2) Program Bidang Ukhuwah Islamiyah
3) Program Bidang Dakwah dan Pengembangan Masyarakat
4) Program Bidang Pendidikan dan Kaderisasi
5) Program Bidang Pengkajian dan Penelitian
6) Program Bidang Hukum dan Perundang-Undangan
7) Program Bidang Pemberdayaan Ekonomi Umat
8) Program Bidang Perempuan, Remaja, dan Keluarga
9) Program Bidang Hubungan Antar Umat Beragama
10) Program Bidang Informatika dan Komunikasi
11) Program Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerjasama Internasional

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

12) Program Bidang Pembinaan Seni Budaya Islam

Disamping itu, Majelis Ulama Indonesia memiliki program yang dilaksanakan oleh badan dan lembaga di lingkungan Majelis Ulama Indonesia yaitu:

1) Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, Minuman dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI);
2) Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI);
3) Badan Arbitrase Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (BASYARNAS MUI);
4) Lembaga Pemuliaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Majelis Ulama Indonesia (LPLH-SDA MUI);
5) Komite Dakwah Khusus Majelis Ulama Indonesia (KDK MUI);
6) Lembaga Pentashhih Buku dan Konten Keislaman;
7) Lembaga Wakaf, Zakat, Infak, dan Sedekah;
8) dan yang dianggap perlu, dan ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia.

Sedangkan lembaga/badan yang ada di Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur meliputi:

1) Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, Minuman, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI). SK Kepengurusan LPPOM MUI Jawa Timur ditandatangani oleh LPPOM MUI Pusat atas usulan dari Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur. Secara kelembagaan dan keorganisasian

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

LPPOM MUI Jawa Timur bertanggung jawab kepada Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur dan LPPOM MUI Pusat.

2) Badan Arbitrase Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (BASYARNAS MUI) merupakan kepanjangan tangan dari BASYARNAS MUI Pusat. SK Kepengurusan BASYARNAS MUI Jawa Timur dikeluarkan oleh BASYARNAS MUI Pusat atas usulan Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur.
3) Ikatan Dai Area Lokalisasi Majelis Ulama Indonesia (IDIAL MUI) merupakan organisasi yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur untuk membantu pemerintah dalam program pengentasan WTS dan penutupan tempat prostitusi.
4) Gerakan Umat Islam Bersatu Jawa Timur (GUIB JATIM) merupakan organisasi forum yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur sebagai media komunikasi dan koordinasi antar organisasi masyarakat dan lembaga Islam di Jawa Timur untuk menyikapi berbagai persoalan umat Islam.
5) Lembaga Pemuliaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam (LPLH-SDA) Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur merupakan kepanjangan dari LPLH-SDA MUI Pusat.

Lingkup program Majelis Ulama Indonesia pada 12 (dua belas) bidang dan 8 (delapan) lembaga serta badan tersebut kemudian

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diterjemahkan berdasarkan pembidangan yang akan dijadikan sebagai acuan dalam pelaksanaan program kerja tahun 2015-2020. Dari 12 (dua belas) bidang dan 8 (delapan) lembaga serta badan tersebut, peneliti akan menjelaskan Program Bidang Fatwa.

1) Program Bidang Fatwa
   a) Mengembangkan kegiatan ilmu syariah di kalangan ulama mengenai berbagai masalah umat Islam sesuai dengan tingkatan kebutuhan dalam memberikan bimbingan dan pedoman hukum bagi umat Islam.
   b) Meningkatkan kedudukan dan peranan Komisi Fatwa menuju kesatuan fatwa sebagai forum ilmiah di antara ulama dengan menyelenggarakan pertemuan secara berkala dan sistematis.
   c) Meningkatkan dan memperluas fatwa dengan mengundang ulama ASEAN atau yang lainnya untuk mewujudkan kesatuan pandangan, khususnya yang berkaitan dengan *hisab* dan *rukyah*, produk halal, obat-obatan, kosmetik, dan kasus sosial lainnya yang terjadi.
   d) Memasyarakatkan hasil kajian ulama Islam dan memberikan masukan kepada instansi pemerintah, lembaga swasta atau perorangan.
   e) Mengusahakan agar fatwa Majelis Ulama Indonesia baik pada tingkat pusat maupum daerah menjadi hukum positif.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

f) Sosialisasi hasil fatwa Majelis Ulama Indonesia melalui media cetak dan elektronik, penerbitan, serta media dakwah lainnya.

2) Dasar Umum dan Sifat Fatwa

a) Penetapan fatwa didasarkan pada Al-Quran, sunnah (*hadits*), *ijma'*, dan *qiyas*.

b) Aktivitas penetapan fatwa dilakukan secara kolektif oleh suatu lembaga yang dinamakan "Komisi Fatwa".

c) Penetapan fatwa bersifat responsif, proaktif, dan antisipatif.

3) Metode Penetapan Fatwa

a) Sebelum fatwa ditetapkan hendaklah ditinjau lebih dahulu pendapat para imam madzhab tentang masalah yang akan difatwakan tersebutsecara seksama, berikut dalil-dalilnya.

b) Masalah yang telah jelas hukumnya (*al-ahkam al-qath'iyyat*) hendaklah disampaikan sebagaimana adanya.

c) Dalam masalah yang terjadi *khilafiyah* dikalangan madzhab, maka:

(1) Penetapan fatwa didasarkan pada hasil usaha penemuan titik temu diantara pendapat-pendapat madzhab melalui metode *al-jam'u wa al-taufiq*.

(2) Jika usaha penemuan titik temu tidak berhasil dilakukan, penetapan fatwa didasarkan pada hasil *tarjih* melalui metode *muqaranah al-madzhab* dengan menggunakan kaidah-kaidah *ushul fiqh muqaran.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d) Dalam maslah yang tidak ditemukan pendapat hhukumnya di kalangan madzhab, penetapan fatwa didasarkan pada hasil *ijtihad jama'i* (kolektif) melaui metode *bayani, ta;lili* (*qiyasi*, *istihsani*, *ilhaqi*), *istishlahi*, dan *sadd al-dzari'ah.*

e) Penetapan fatwa harus senantiasa memperhatikan kemaslahatan umum (*mashalih 'ammah*) dan *maqashid al-sari'ah.*

4) Prosedur Rapat

a) Rapat harus dihadiri oleh para anggota komisi yang jumlahnya dianggap cukup memadai oleh pimpinan rapat.

b) Dalam hal-hal tertentu, rapat dapat menghadirkan tenaga ahli yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas.

c) Rapat diadakan jika ada:

(1) Permintaan dan pertanyaan dari masyarakat yang oleh dewan pimpinan dianggap perlu dibahas dan diberikan fatwanya.

(2) Permintaan atau pertanyaan dari pemerintah, lembaga/organisasi sosial, atau Majelis Ulama Indonesia sendiri.

(3) Perkembangan dan temuan masalah-masalah keagamaan yang muncul akibat perubahan masyarakat dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d) Rapat dipimpin oleh ketua atau wakil ketua komisi atas persetujuan ketua komisi, didampingi oleh sekretaris dan/atau wakil sekretaris komisi.

e) Jika ketua dan wakil ketua komisi berhalangan hadir, rapat dipimpin oleh salah seorang anggota komisi yang disetujui.

f) Selama proses rapat, sekretaris dan/atau wakil sekretaris komisi mencatat usulan, saran, dan pendapat anggota komisi untuk dijadikan risalah rapat dan bahan keputusan fatwa komisi.

g) Setelah melakukan pembahasan secara mendalam dan komprehensif serta memperhatikan pendapat dan pandangan yang berkembang, rapat menetapkan keputusan fatwa.

h) Keputusan komisi sesegera mungkin dilaporkan kepada dewan pimpinan untuk dipermaklumkan kepada masyarakat atau pihak-pihak yang bersangkutan.

5) Format Keputusan Fatwa

a) Keputusan fatwa dirumuskan dengan bahasa hukum yang mudah dipahami oleh masyarakat luas.

b) Keputusan fatwa, memuat:

(1) Judul dan nomor keputusan fatwa.

(2) Kalimat pembuka *basmalah.*

(3) Konsideran yang terdiri atas:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(a) Menimbang, memuat latar belakang, alasan, dan urgensi penetapan fatwa.

(b) Mengingat, memuat dasar-dasar hukum (a*dillah al-ahkam*).

(c) Memperhatikan, memuat pendapat peserta rapat, pendapat para ulama, pendapat para ahli, dan hal-hal lain yang mendukung penetapan fatwa.

(4) Diktum, memuat:

(a) Substansi hukum yang difatwakan.

(b) Rekomendasi dan/atau jalan keluar, jika dipandang perlu.

(5) Penjelasan, berisi uraian dan analisis secukupnya tentang keputusan fatwa.

(6) Lampiran-lampiran, jika dipandang perlu.

c) Keputusan fatwa ditandatangani oleh ketua dan sekretaris komisi.

6) Kewenangan dan Wilayah Fatwa

a) Majelis Ulama Indonesia berwenang menetapkan fatwa mengenai masalah-masalah keagamaan secara umum, terutama masalah hukum (*fiqh*) dan masalah akidah yang menyangkut kebenaran dan kemurnian keimanan umat Islam Indonesia.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) Majelis Ulama Indonesia berwenang menetapkan fatwa mengenai masalah-masalah keagamaan seperti tersebut pada nomor satu yang menyangkut umat Islam Indonesia secara nasional atau masalah-masalah keagamaan di suatu daerah yang diduga dapat meluas ke daerah lain.

c) Terhadap maslah yang telah ada keputusan fatwa MUI, Majelis Ulama Indonesia Daerah hanya berhak melaksanakannya.

d) Jika karena faktor-faktor tertentu keputusan fatwa Majelis Ulama Indonesia sebagaimana dimaksud nomor tiga tidak dapat dilaksanakan, Majelis Ulama Indonesia Daerah boleh menetapkan fatwa yang berbeda setelah berkonsultasi dengan Majelis Ulama Indonesia.

e) Dalam hal belum ada keputusan fatwa Majelis Ulama Indonesia, Majelis Ulama Indonesia Daerah berwenang menetapkan fatwa.

f) Khusus mengenai masalah-masalah yang sangat musykil dan sensitif, sebelum menetapkan fatwa, Majelis Ulama Indonesia Daerah diharapkan terlebih dahulu melakukan konsultasi dengan Majelis Ulama Indonesia.

b. Pelaksanaan Program

1) Dalam implementasi program akan dibahas dan ditetpakan setiap tahun dalam Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) Majelis Ulama

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Indonesia. Program komisi, badan, dan lembaga hendaknya mencakup jenis kegiatan, tujuan, target dan sasaran, rincian kegiatan, pelaksanaan kegiatan, jadwal, dan sumber dana.

2) Pelaksanaan program kerja dapat dilakukan dengan bekerja sama degnan institusi atau lembaga lain, baik Pemerintah maupun non Pemerintah, seperti *Islamic Development Bank* (IDB), bank syariah, *Baitul Maal wat-Tamwil* (BMT), kementerian, Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/ Badan Usaha Milik Daerah (BUMND), BAZDA BAZNAS pusat dan daerah, koperasi syariah, dan Pengusaha Nasional/Daerah.
3) Memaksimalkan program lanjutan yang sudah menjadi program rutin (baik bulanan dan tahunan), seperti: seminar bulanan ekonomi syariah, halal expo, succes syariah Metro, Global Halal Summit.
4) Pelaksanaan program dioptimalkan dalam rangka memprkuat konsep Islam Indonesia yang unggul, toleran, dan berkemajuan.

.

12. Sumber Dana Majelis Ulama Indonesia

Sumber dana Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur diperoleh dan diupayakan dari berbagai sumber, antara lain yaitu:

a. Bantuan masyarakat, berupa sumbangan insidentil, infaq maupun sedekah.
b. Bantuan pemerintah, baik melalui APBN (Pusat), APBD (Daerah), atau bantuan insidentil lainnya. Majelis Ulama Indonesia Pusat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mendapatkan bantuan dari APBN, sedangkan Majelis Ulama Indonesia Daerah mendapatkan bantuan dari APBD. Besar kecilnya bantuan yang didapatkan tergantung dari pemerintah di daerah masing-masing.

c. Kerjasama program/kegiatan dengan berbagai pihak, baik pemerintah maupun non pemerintah, baik dari dalam negeri maupun luar negeri.[77]

B. Penyajian Data

1. Program Rapat Kerja Daerah (RAKERDA) Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur.

Ada beberapa agenda yang dilakukan pada Rapat Kerja Daerah (RAKERDA) Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur tahun 2017. Di sini akan dijelaskan sebagian diantaranya, yaitu sebagai berikut:

a. Diskusi planel.

Diskusi planel membahas tiga program, yaitu sebagai berikut:

1) Pemantapan Akidah Islamiyah Berbasis Islam Wasathiyah.

Ada beberapa masalah yang dihadapi Umat Islam, yaitu sebagai berikut:

a) Masalah pendangkalan akidah dan syariah.

(1) Masalah aliran-aliran menyimpang.

(2) Masalah berkembangnya pemikiran liberal dan sekuler, termasuk pluralisme agama.

[77] Dokumentasi (*Pedoman Penyelenggaraan Organisasi Majelis Ulama Indonesia*, (Surabaya: Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur, 2013), Hal. 17-18) dan wawancara pada Hari Kamis tanggal 25 Januari 2108.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) Masalah ukhuwah Islamiyah.

(1) Masalah *ananiyah hizbiyah* (ego sektoral).

(2) Masalah Umat Islam yang dibenturkan sesama muslim

c) Masalah dakwah Islamiyah

(1) Kenyataannya dakwah dalam banyak hal masih belum optimal. Dalam beberapa kasus dakwah belum menyentuh persoalan umat, sendiri-sendiri, tidak terencana, bahkan saling menegasikan/berbenturan antar lembaga dakwah.

(2) Dakwah yang seharusnya bersifat sistematik, masih sering direduksi hanya sebatas tabligh.

(3) Dalam beberapa kasus ditemui dai-dai yang bermasalah, baik terkait dengan metode penyampaian dakwahnya, maupun kontennya yang bermasalah.

(4) Masih rendahnya kepekaan terhadap masalah-masalah keumatan.

d) Masalah moralitas

(1) Masalah krisis kejujuran.

(2) Masalah *hubbud dunya wa karahiyatul maut*.

(3) Masalah pornografi yang semakin marak meskipun sudah ada undang-undang yang mengaturnya.

(4) Invasi budaya asing yang tidak sesuai dengan ajaran Islam yang dapat menggeser nilai-nilai Islam.

(5) Masalah narkoba.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(6) Masalah LGBT yang bertambah marak.

(7) Masalah perzinaan/prostitusi online dan sebagainya.

(8) Masalah tempat-tempat hiburan seperti karaoke dan sebagainya yang menjadi sarana kemaksiatan dan kemungkaran.

(9) Masalah banyaknya obyek wisata yang masih digunakan untuk perbuatan maksiat.

(10) Masalah banyaknya panti pijat yang menjadi sarana perzinaan terselubung.

(11) Masalah masalah rasa malu yang sudah tidak ada lagi ketika berbuat kejahatan.

(12) Masalah korupsi yang membudaya.

(13) Masalah gerakan politik yang tidak bermoral banyaknya warung atau restoran yang masih menggunakan bahan haram atau menjual makanan haram.

(14) Masalah pendirian pabrik-pabrik minuman keras yang masih diberi izin oleh pemerintah.

e) Masalah sosial politik

(1) Masalah Islamophobia.

(2) Masalah adanya undang-undang yang mengebiri terhadap keyakinan Umat Islam dalam menerapkan syariat Islam.

(3) Masalah dalam setiap pergantian kepemimpinan ada saja hal-hal yang merugikan Islam dan Umat Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(4) Masalah gerakan zionisme dan kristenisasi serta gerakan *grand design* Barat.

(5) Masalah terorisme, radikalisme, dan anarkisme.

(6) Masalah kepemimpinan nasional.

(7) Isu HAM yang tidak konsisten. Contohnya masih ada karyawan di suatu perusahaan yang tidak diberi kebebasan untuk melakukan ibadah.

(8) Masalah demokrasi yang *kebablasan*.

(9) Masalah biaya pemilu yang mahal atau boros.

(10) Masalah pemaknaan dan interpretasi Pancasila yang berbeda-beda.

(11) Masalah amandemen UUD 1945 diantaranya ada yang merugikan Bangsa Indonesia, khususnya Umat Islam, antara lain amandemen Pasal 6 dan 33 UUD 1945.

f) Masalah ekonomi/*iqtishodiyah*

(1) Masalah aset-aset negara yang dikuasai asing.

(2) Masalah banyaknya kekayaan Indonesia yang mengair ke luar negeri.

(3) Masalah kesenjangan sosial.

(4) Masalah kemiskinan, kebodohan (termasuk kurangnya pemahaman agama), dan keterbelakangan.

(5) Masalah masih maraknya praktik rentenir di masyarakat kalangan bawah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(6) Masalah tanah dan lahan Umat Islam yang beralih fungsi dan dikuasai oleh pihak lain.

(7) Masalah Indonesia adalah negara agraris tetapi masih mengimpor bahan makanan dari luar negeri.

(8) Masalah seputar pengembangan ekonomi Islam yang masih banyak menghadapi hambatan.

(9) Masalah 11.000 triliun uang pengusaha Indonesia berada di luar negeri.

(10) Masalah ada delapan koorporasi terbesar di Indonesia dan masalah sembilan naga.

g) Lain-lain

(1) Fenomena liberalisme yang menggerus berbagai aspek (liberalisme ekonomi, politik, sosial budaya, dan agama).

(2) 90% informasi berasal dari televisi dan koran (bukan milik muslim).

(3) Masalah maraknya berita *hoax* atau *hate speech* di media sosial yang menimbulkan permusuhan atau adu domba antar masyarakat.

(4) Masalah demokrasi Indonesia dikuasai oleh pemodal besar.

(5) Masalah isu kebangkitan komunisme.

(6) Masalah seputar makna kerukunan dan toleransi, makna bhineka tunggal ika, makna *rahmatan lil 'alamin*, dan sebagainya (perlu diluruskan).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(7) Masalah nilai-nilai agama yang kurang digali sebagai pedoman dan sumber inspirasi.

Ada beberapa prinsip wasathiyah, diantaranya sebagai berikut:

(1) *Tawassuth* yaitu mengambil jalan tengah, menghindari sikap ekstrim (*tatharruf* atau *ghuluw*) (tidak liberal dan tidak pula kaku serba tidak boleh).

(2) *Tawazun* yaitu berkeseimbangan, dapat membedakan antara mana yang termasuk perbedaan yang dapat ditolerir dan mana yang termasuk pada penyeimbangan.

(3) *I'tidal* yaitu tegak lurus/menjaga prinsip-prinsip keadilan.

(4) *Tasamuh* yaitu toleran. Secara internal menghargai perbedaan yang bersifat *furu'iyah* dan menyepakati satu sikap yang sama ketika menghadapi/menyikapi masalah-masalah *ushuliyah* (akidah). Secara eksternal menghormati orang lain yang berbeda agama tanpa mencampur aduk ajaran agama (menolak paham pluralisme agama).

(5) *Aulawiyah* yaitu mendahulukan prioritas.

(6) *Musawah* yaitu egaliter *non* diskriminatif.

(7) *Syura* yaitu musyawarah.

(8) *Ishlah* yaitu reformasi.

(9) *Tathawwur wa ibtikar* yaitu dinamis, kreatif, dan inovatif.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(10) *Tahaddur* yaitu berkeadaban.[78]

2) Menata Ukhuwah, Sinergi Dakwah untuk Indonesia Berkah.

Ada beberapa masalah aktual yang harus disikapi dengan serius. Maka dari itu, perlu melakukan langkah-langkah positif untuk mengatasinya dengan upaya secara maksimal, sehingga umat Islam tetap memiliki kekuatan (*power*). Selain itu, juga agar tetap eksis dalam menentukan arah Negeri Indonesia ini menuju masyarakat madani, yakni masyarakat sejahtera lahir dan batin. Masyarakat yang damai, rukun, makmur, aman, tentram, serta agamis (*religius*), sehingga cita-cita membangun masa depan bangsa ini dengan predikat *baldatun thayyibatun warabbun ghafuur* menjadi kenyataan. Seperti yang tertera dalam Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 96, Surah Saba' ayat 15, dan Surah An-Nur ayat 55 berikut:

ولو ان اهل القرى أمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركت من السماء والارض ولكن كذبوا فاءخذنهم بما كانوا يكسبون[79]

Jikalau sekiranya penduduk neger-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah ddari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. (Q.S. Al-A'raf ayat 96)[80]

لقد كان لسباء في مسكنهم أيةٌ جنتان عن يمين وشمالٌ كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور[81]

[78] Dokumentasi dan observasi pada Rapat Kerja Daerah Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur yang dilaksanakan pada Hari Kamis tanggal 23 November 2017 di Asrama Haji Sukolilo Surabaya.
[79] Al-Qur'an dan terjemah Mushaf Al-Azhar, Surah Al-A'raf ayat 96, hal. 163.
[80] Ibid.
[81] Al-Qur'an dan terjemah Mushaf Al-Azhar, Surah Saba' ayat 15, hal. 430.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sesungguhnya bagi kaum Saba' ada tanda (kekuasaan Tuhan) di tempat kediaman mereka yaitu dua buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri. (kepada mereka dikatakan): 'Makanlah olehmu dari rezeki yang (dianugerahkan) Tuhanmu dan bersyukurlah kamu kepada-Nya. (Negerimu) adalah negeri yang baik ddan (Tuhanmu) adalah Tuhan Yang Maha Pengampun'. (Q.S. Saba' ayat 15)[82]

وعد الله الذين أمنوا منكم وعملوا الصلحت ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمناۚيعبدو نني لا يشركون بي شياءۚومن كفربعدذلك فاءولئك هم الفسقون[83]

Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang saleh bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhai-Nya untuk mereka, dan Dia benar-benar adan menukar (keadaan) mereka, sesudah mereka dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Merka tetap menyembah-Ku dengan tiada mempersekutukan sesuatu apa pun dengan Aku. Dan barangsiapa yang (tetap) kafir sesudah (janji) itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. (Q.S. An-Nur ayat 55)[84]

Ada beberapa masalah Umat Islam yang harus memperoleh perhatian, yaitu ukhuwah Islamiyah, dakwah Islamiyah, *tarbiyah* Islamiyah, masalah *iqtishadiyah* (ekonomi), masalah *siyasah* Islamiyah (masalah politik), masalah media, masalah lingkungan hidup, masalah hukum (dalam penegakan hukum), dan lain-lain. Namun, di sini akan dibahas dua masalah, yaitu ukhuwah Islamiyah dan dakwah Islamiyah.

a) Ukhuwah Islamiyah

[82] Ibid.
[83] Al-Qur'an dan terjemah Mushaf Al-Azhar, Surah An-Nur ayat 55, hal. 357.
[84] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Diantara tantangan terbesar yang dihadapi Umat Islam sepanjang sejarah terutama di Indonesia adalah sulitnya membangun ukhuwah Islamiyah yang mampu bertahan lama. Hal yang menjadi akar masalah tentang kesulitan itu terutama terletak pada fakta. Hal tersebut karena sering kandasnya ajaran Islam yang luhur itu ketika berhadapan dengan kepentingan dan egoisme pribadi atau golongan.

Islam telah memberikan sumbangan yang sangat besar terhadap peradaban manusia secara keseluruhan. Akan tetapi, persoalan ukhuwah internal Umat Islam yang sampai saat ini belum terwujud dengan sebenarnya atau masih dalam kondisi semu, maka tetap saja mengganggu langkah-langkah perjuangan dalam mencapai tujuan. Sedangkan Umat Islam memahami bahwa, tidak ada suatu kemenangan (kesuksesan) kecuali dengan kekuatan (*power*). Tidak akan terwujud suatu kekuatan kecuali dengan persatuan (ukhuwah). Tidak akan ada persatuan kecuali dengan menegakkan prinsip keutamaan dengan membangun kesamaan visi dan misi yang sinergis. Ini semua kembali pada agama (Islam).

Ada beberapa langkah yang bisa mendorong terhadap ukhuwah Islamiyah, antara lain sebagai berikut:

(1) *Tasamuh* (toleransi)

(2) *Tawassuth* (moderat)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(3) *Ta'awun* (gotong royong)

(4) *Musawah* (kesetaraan)

(5) *Takaful ijtima'i* (solidaritas sosial)

(6) *Istiqomah* (disiplin)

(7) *Mahabbah* (cinta kasih)

(8) Mempertinggi identitas *silaturrahim*

(9) Sosialisasi pemahaman dan memaknaan terhadap ajaran Islam secara komprehensif.

(10) Pengembangan makna ukhuwah Islamiyah dengan Ukhuwah *wathaniyah* dan ukhuwah *basyariyah.*

(11) Membersihkan kecenderungan-kecenderungan batin intelektual yang selama ini didominasi oleh etika golongan, suku, dan ras dengan kembali kepada Al-Quran dan sunnah. Selain itu juga dikuatkan/didukung dengan konsep *ma ana 'alaihi wa ash haabihi* yang dipahami secara utuh, jujur, dan bertanggung jawab.

(12) Kesediaan Umat Islam untuk menilai secara kritis dengan metodologi Islam (*manhaj* Islami), terhadap seluruh warisan intelektual dan kultural Islam. Hal tersebut dilakukan dengan penuh kejujuran dan juga secara ilmiah, yang jauh dari virus paham-paham yang merusak dan mendangkalkan akidah dan syariat Islam.

b) Dakwah Islamiyah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dakwah Islamiyah merupakan segala aktifitas yang bersifat mengajak, menyeru, dan memanggil orang untuk beriman dan bertakwa kepada Allah. Hal tersebut dilakukan sesuai akidah, syariat, dan akhlak Islamiyah serta adanya usaha untuk meningkatkan kualitas hidup, baik untuk dirinya, keluarganya, maupun masyarakat. Oleh sebab itu, dakwah merupakan upaya peningkatan pada semua aspek kehidupan untuk terciptanya keseimbangan pemenuhan kebutuhan jasmani, nafsani, dan rohani, sehingga dakwah sangat terkait dengan pembinaan dan pembangunan bangsa.

Pelaksanaan dakwah bisa diklasifikasikan dengan dakwah *bil lisan*, *bil hal*, dan *bil qalam.* Adapun prinsip-prinsip dakwah sebagai berikut:

(1) Prinsip peningkatan kualitas

(2) Prinsip penyebaran dan pemerataan

(3) Prinsip partisipasi

(4) Prinsip dakwah *bil hal*

(5) Prinsip dakwah *bil lisan*

(6) Prinsip dakwah *bil qalam*

(7) Prinsip adab dan akhlak dai

Sebagai dai, hendaknya memahami problematikan dan tantangan dakwah serta metodologi dakwah secara terpadu dalam menghadapi heterogenitas perkembangan pemikiran, khususnya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

di Indonesia. Selain itu juga memahami berbagai wawasan dakwah. Untuk mencapai tujuan dakwah yang lebih sempurna, dalam rangka pembebasan umat dan tekanan kapitalisme global menuju kemerdekaan sejati maka, gerakan dakwah di Indonesia hendaknya dirancang strategi sebagai berikut.

(1) Membumikan tauhid sebagai pandangan hidup (*way of life*).

(2) Peningkatan dai dan lembaga dakwah.

(3) Mewujudkan jaringan ekonomi umat (yang halal).

(4) Penguasaan teknologi media dan komunikasi dakwah.

(5) Penguasaan informasi dakwah yang dalam hal ini perlu peta dakwah lokal, regional, dan nasional. Demikian juga perlu kurikulum dan materi dakwah.

(6) Menyampaikan Islam terhadap sasaran dakwah pada semua lingkungan dan lapisan masyarakat.

(7) Mengefektifkan Khutbah Jumat sebagai sarana membangun kesadaran dalam menghadapi tantangan secara bersama.

(8) Penciptaan seni budaya yang Islami.

(9) Menyajikan Islam sebagai agama pembebas.[85]

3) Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Syariah untuk Kedaulatan dan Kemandirian Bangsa.

[85] Dokumentasi dan observasi pada Rapat Kerja Daerah Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur yang dilaksanakan pada Hari Kamis tanggal 23 November 2017 di Asrama Haji Sukolilo Surabaya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Salah satu problematika bangsa Indonesia terdapat pada sektor sosial ekonomi. Tantangan umat yang kompleks (tantangan internal dan eksternal) membutuhkan penyikapan yang produktif dan keberanian, untuk melakukan perubahan-perubahan secara komprehensif. Hal ini dilakukan demi kesejahteraan bangsa dan negara, sesuai dengan kesepakatan berdasarkan Pancasila dan Pembukaan UUD 1945. Hal tersebut juga diperlukan prinsip *tansiqul harakah* (mensinkronkan gerakan dakwah), taswiyatul manhaj (penyamaan pola pikir), dan himayatul ummah (membangun persatuan umat).

Masalah sosial ekonomi merupakan suatu hal yang tidak bisa dianggap remeh. Ada cara untuk mengatasi masalah ini, salah satunya yaitu dengan membangun gerakan ekonomi umat, diantaranya sebagai berikut:

a) Pendirian BMT/koperasi syariah.
b) Gerakan menggunakan produk sendiri.
c) Pengembangan ekonomi syariah.
d) Pemberdayaan wakaf dan infak (zakat dan sedekah).
e) Penguatan usaha kecil dengan pendampingan.
f) Gerakan membangun arus baru ekonomi umat.
g) Pengembangan gerakan wisata syariah.[86]

[86] Dokumentasi dan observasi pada Rapat Kerja Daerah Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur yang dilaksanakan pada Hari Kamis tanggal 23 November 2017 di Asrama Haji Sukolilo Surabaya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Sidang komisi.

Sidang komisi membahas dua agenda, yaitu membahas program kerja dan rekomendasi.

1) Program Kerja

Secara nasional, Majelis Ulama Indonesia Pusat telah merumuskan garis-garis besar program kerja yang telah disahkan dalam Musyawarah Nasional (MUNAS) IX Majelis Ulama Indonesia 2015 di Surabaya. Pada Musyawarah Daerah Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur IX tahun 2015 telah diputuskan garis besar program kerja Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur masa khidmat tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 yang merupakanturunan dari garis besar program kerja Majelis Ulama Indonesia Pusat tersebut.

Merujuk pada garis-garis besar program kerja Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur masa khidmat tahun 2015 sampai dengan tahun 2020, maka rapat kerja daerah Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur tahun 2017 telah memberikan penekanan untuk menjadi program prioritas sebagai berikut:

a) Program pemberian fatwa dan tausyiah untuk merespon berbagai persoalan yang ada di masyarakat, baik atas dasar permintaan maupun berdasarkan pertimbangan Majelis Ulama Indonesia perlu dilakukan kajian fatwa dan atau penyampaian tausyiah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) Program *mudzakarah da'i* yang merupakan program bersama antara Komisi Dakwah dan Komisi Ukhuwah sebagai media silaturrahim da'i dan tokoh Islam dari berbagai latar belakang untuk mendiskusikan berbagai masalah keumatan.

c) Menuntaskan program peta dakwah menindaklanjuti hasil rapat koordinasi Komisi Dakwah yang diselenggarakan di Pacet Mojokerto tahun 2017. Dihaapkan awal tahun 2018 data-data dari daerah telah terkumpulkan.

d) Program Sosialisasi Pedoman Dakwah Majelis Ulama Indonesia. Majelis Ulama Indonesia telah menyelesaikan penyusunan Pedoman Dakwah *Wasathiyah* yang diharapkan menjadi kode etik bersama dalam penyelenggaraan dakwah sehingga terjalin koordinasi , saling melengkapi tidak saling menegasikan dan berbenturan satu sama lain.

e) Program Pendidikan Kader Ualam dan Da'i yang diselenggarakan sesuai dengan kemampuan.

f) Program pemberdayaan, pengembangan, dan penguatan ekonomi syariah melalui rintisan Baitul Maal wat Tamwil, koperasi syariah, menorong untuk menumbuhkan bisnis berbasis keumatan, serta melakukan standarisasi sumber daya manusia pengawas syariah melalui pelatihan dan uji kompetensi.

g) Program advokasi termasuk untuk mewakili Majelis Ulama Indonesia di luar maupun di dalam pengadilan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

h) Program pemantauan dan pengkajian kebijakan.

i) Program pembinaan kelembagaan Majelis Ulama Indonesia Daerah, penyelenggaraan Musyawarah Daerah (MUSDA) Majelis Ulama Indonesia Kabupaten/Kota sesuai dengan periodesasi kepengurusan, serta pemantapan peran koordinatoriat wilayah. Koordinatoriat wilayah seyogyanya dibuat bergilir antar kabupaten/kota dalam satu wilayah koordinasi dengan tetap memperhatikan kesiapan masing-masing kabupaten/kota untuk dipilih menjeadi koordinator.

j) Program pemantauan dan pengkajian terhadap aliran/faham keagamaan yang berkembang, meneliti dan mengkaji buku, tulisan, ataupun naskah-naskah yang diduga menyimpang dari ajaran Islam.

k) Mengoleksi dan mengelola informasi yang tersebar di media, khususnya yang mempunyai dampak signifikan bagi kehidupan beragama, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

l) Program sosialisasi pedoman bermuamalah di media sosial yang sedapat mungkin dilakukan dengan menggandeng dinas terkait.

m) Penuntasan program pengentasan wanita tuna susila (WTS) dengan melakukan evaluasi pasca penutupan, khususnya melalui Ikatan Da'i Area Lokalisasi (IDIAL) Majelis Ulama Indonesia.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

n) Program penggalian dan pengembangan dana untuk menopang program-program Majelis Ulama Indonesia melalui kerjasama dengan lembaga-lembaga di luar Majelis Ulama Indonesia.

o) Program penguatan bina keluarga sakinah dan perlindungan balita, remaja, dan lansia.

2) Rekomendasi dan Pernyataan Sikap

a) Kepada Majelis Ulama Indonesia Pusat

(1) Kasus genosida yang menimpa Muslim Rohingya yang sampai saat ini masih belum selesai, sekalipun pemberitaan di media sudah tidak gencar. Namun demikian, Rapat Kerja Daerah Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur tahun 2017 merekomendasikan kepada Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Pusat untuk menyampaiakan rekomendasi secara tegas yang memuat hal-hal sebagai berikut:

(a) Sangat mengutuk tragedi tersebut dan menyatakan bahwa perilaku penganiayaan, pemerkosaan, pengusiran, dan pembantaian masal kepada warga Muslim Rohingya adalah perbuatan biadab yang tidak pantas dilakukan oleh manusia yang beradab.

(b) Mendesak kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa dan organisasi internasional lainnya seperti ASEAN dan OKI agar menekan kepada pemerintah Myanmar untuk segera

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menghentikan kejahatan kanusiaan tersebut yang sangat mencederai hak-hak asasi manusia.

(c) Mendesak kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa dan organisasi internasional lainnya seperti ASEAN dan OKI agar menekan kepada pemerintah Myanmar untuk mengembalikan hak kewarganegaraan Muslim Rohingya karena mereka telah mendiami wilayah ini jauh sebelum negara Myanmar berdiri.

(d) Mendesak kepada pemerintah Republik Indonesia untuk melakukan upaya-upaya diplomatik, baik secara langsung, maupun melalui lembaga-lembaga/badan internasional untuk menekan pemerintah Myanmar agar segera menghentikan kejahatan kemanusiaan tersebut.

(2) Mendukung sepenuhnya upaya Majelis Ulama Indonesia Pusat untuk melakukan klarifikasi kepada Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi terkait aliran kepercayaan.

(3) Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu provinsi yang telah ditunjuk untuk mendirikan perwakilan DSN. Namun, sampai saat ini belum ada rumusan tentang tugas-tugas secara jelas dari perwakilan DSN. Untuk itu, meminta kepada DSN Majelis Ulama Indonesia, melalui Majelis Ulama Indonesia Pusat agar segera memberikan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rumusan tugas-tugas yang jelas, khususnya terkait dengan penyelenggaraan pelatihan pengawas syariah yang secara mendesak sangat dibutuhkan di daerah.

(4) Pasca kasus penodaan agama yang dilakukan oleh mantan Gubernur DKI Basuki Tjahaya Purnama yang diikuti dengan terbitnya Perppu ormas, ada kesan telah terjadi potensi disintegrasi umat. Untuk itu mendorong kepada Majelis Ulama Indonesia Pusat untuk mengupayakan dialog, minimal di tingkat elit pimpinan ormas Islam untuk memperkokoh kesatuan Umat Islam, guna mencegah disintegrasi.

b) Kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur

(1) Program penutupan lokalisasi prostitusi telah dituntaskan dengan ditutupnya lokalisasi Balongcangkring Mojokerto tahun 2015. Namun demikian, tidak berarti program ini telah berakhir karena efek dari penutupan masih perlu dituntaskan. Untuk itu meminta kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur agar tetap memasukkan program ini dalam program prioritas termasuk menyediakan penganggarannya yang juga meliputi penganggaran untuk mitra kerja seperti Ikatan Dai Lokalisasi (IDIAL) Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur.

(2) Sehubungan dengan masih adanya pemerintah daerah kabupaten/kota yang ada kekhawatiran dalam memberikan bantuan kepada Majelis Ulama Indonesia Kabupaten/kota,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memohon kepada Bapak Gubernur berkenan mengeluarkan edaran untuk memberikan penjelasan tentang masalah ini. Bahwa sebagaimana dalam PERMENDAGRI No. 32 tahun 2011 yang direvisi dengan PERMENDAGRI No. 39 tahun 2012 memang dinyatakan dalam pasal 4 ayat (4) huruf b bahwa, hibah tidak terus menerus setiap tahun. Namun dalam ketentuan ini terdapat pengecualian yaitu kalimat "kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan". Sedangkan dalam kaitannya dengan pendanaan Majelis Ulama Indonesia telah ada Peraturan Presiden No. 151 tahun 2014.

c) Kepada Bupati/Wali Kota

(1) Terkait masih adanya pemerintah kabupaten/kota yang khawatir dalam memberikan pendanaan kepada Majelis Ulama Indonesia Kabupaten/kota, dengan ini disampaikan bahwa, sebagaimana dalam PERMENDAGRI No. 32 tahun 2011 yang direvisi dengan PERMENDAGRI No. 39 tahun 2012, dinyatakan dalam pasal 4 ayat (4) huruf b bahwa, hibah tidak terus menerus setiap tahun. Namun dalam ketentuan ini terdapat pengecualian yaitu kalimat "kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan". Sedangkan dalam kaitannya dengan pendanaan Majelis Ulama Indonesia telah ada Peraturan Presiden No. 151 tahun 2014. Untuk itu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dimohon agar hal ini dapat ditelaah kembali sehingga diharapkan tidak ada kekhawatiran lagi dalam memberikan bantuan kepada Majelis Ulama Indonesia Kabupaten/kota.

(2) Terkait dengan pendanaan Majelis Ulama Indonesia tersebut, dalam hal bahwa hibah diberikan kepada badan hukum, maka perlu disampaikan bahwa, Majelis Ulama Indonesia adalah lembaga berbadan hukum perkumpulan. Badan hukum Majelis Ulama Indonesia di daerah mengikuti badan hukum Majelis Ulama Indonesia Pusat yang terdaftar di KEMEKUM HAM, karena antara Majelis Ulama Indonesia Pusat dan Majelis Ulama sampai di tingkat paling bawah adalah satu kesatuan yang diatur dengan satu Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga Majelis Ulama Indonesia.

2. Program Bidang Fatwa

Beberapa program Bidang Fatwa yaitu sebagai berikut:

a. Mengembangkan kegiatan ilmu syariah di kalangan ulama.
b. Meningkatkan kedudukan dan peranan Komisi Fatwa.
c. Meningkatkan dan memperluas fatwa dengan mengundang ulama ASEAN atau yang lainnya.
d. Memasyarakatkan hasil kajian ulama Islam.
e. Mengusahakan agar fatwa Majelis Ulama Indonesia menjadi hukum positif.
f. Sosialisasi hasil fatwa Majelis Ulama Indonesia melalui media cetak dan elektronik, penerbitan, serta media dakwah lainnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Faktor Penghambat Koordinasi Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur

Ada beberapa faktor yang dapat menghambat terjadinya koordinasi yang dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur, antara lain sebagai berikut:

a. Ketidakhadiran beberapa anggota dalam rapat.

Rapat koordinasi tidak selalu dihadiri oleh semua anggota yang bersangkutan. Seperti yang disampaikan oleh informan berikut.

> Berapa ya? Yang pasti ndak selalu ada semua sih. Ndak selalu ada lengkap. Kadang satu orang ndak ada, kadang ya dua orang, kadang tiga orang. Ndak pasti selalu bisa ikut semua. Tapi kita ya tetap *share* informasinya. Ehm meskipun ada yang ndak bisa hadir ya tetap dikasih tahu. Profesinya kan beda-beda. Kan semuanya ndak sama. Ada yang nggak hadir karena ini, karena itu, macem-macemlah.[87]

b. Lokasi tempat tinggal yang jauh sehingga menyulitkan anggota untuk datang tepat waktu untuk melaksanakan rapat.

Rapat koordinasi tidak selalu berjalan tepat waktu. Adakalanya rapat baru dimulai melebihi waktu yang telah ditentukan. Hal ini salah satunya karena menunggu kedatangan anggota yang lain. Seperti yang disampaikan oleh informan berikut.

> Ada yang rumahnya deket sini Mbak. Di luar Surabaya, Gresik, Sampang, banyak juga di luar Surabaya. Yang jauh-jauh itu ya kasihan juga transportnya. Makanya nggak heran juga kalau yang jauh-jauh itu jarang dateng. Ada juga yang tetap dateng ya walaupun kadang-kadang terlambat. Yang dateng terlambat itu masih untung bisa dateng. Ya Alhamdulillah.[88]

[87] Wawancara Hari Rabu tanggal 15 November 2017.
[88] Wawancara Hari Jumat tanggal 24 November 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Masing-masing anggota memiliki kesibukan/pekerjaan lainnya, sehingga sulit untuk mencari waktu yang tepat agar semua anggota bisa hadir dalam rapat.

Tidak semua sumber daya manusia di Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur memiliki pekerjaan yang sama. Mereka memiliki profesi yang berbeda-beda. Itulah salah satu yang menyebabkan mereka ada yang tidak bisa hadir ketika rapat koordinasi. Akan tetapi, hal tersebut tidak menjadi hambatan untuk tetap bisa melakukan koordinasi, meskipun secara tidak langsung. Hal ini karena adanya teknologi yang semakin canggih. Seperti yang disampaikan oleh informan berikut.

> Yak karna itu, apalagi sekarang. Sekarang sudah ada namanya WA ya? Jadi masing-masing komisi itu ada punya WA ya. Saya selaku sekretaris umum mengkoordinasi masing-masing. Lha Komisi Dakwah sekarang kegiatan apa kita share ke Komisi Dakwah. Jadi ya hpnya sekretaris umum itu isisnya adalah hpnya komisi-komisi. Komisi punya hpnya sekretaris umum. Semua sekretais umum e komisi hanya punya masing-masing komisi sendiri tapi sekretaris umum punya grupnya sekretaris komisi ya. Lha misalnya Komisi Hukum lagi bahas apa kita masuk kesana ya? Jadi itu yang kita kerjakan. Ya Alhamdulillah dibantu sama teknologi sekarang lebih gampang koordinasi. Sehingga kita rapat bisa walaupun nggak hadir. Misalnya besok ada rapat persiapan ada mudzakaroh kemudian sekaligus persiapan ada kegiatan di Bangkalan udah langsung. Rapat walaupun kita nggak datang udah kita itu. Di sini inini. Jadi seperti itu kita lakukan.[89]

d. Anggaran dana.

[89] Wawancara Hari Kamis tanggal 25 Januari 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hal yang sering menjadi kendala dalam organisasi adalah masalah dana. Begitu juga di Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur. Seperti yang disampaikan oleh informan berikut.

> Ya walau pun ya kendala apa? Kendala utamanya Majelis Ulama barangkali ya tentu ada kecukupan dana, seperti itu ya. Bagaimana kita mengatasi kecukupan dana diharapkan masing-masing pimpinan komisi ini kreatif. Menggandeng CSR ya. CSR itu bisa perusahaan, bisa mitra dalam bentuk LAZ atau Lembaga Amil Zakat atau donatur-donatur. Ni ya ehm kita kembangkan supaya bisa berdaya. Sebab kalau kita mengandalkan anggaran saja dari pemerintah tentu sangat-sangat tidak cukup untuk operasional kegiatan.[90]

C. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Koordinasi Kinerja Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur

a. Program Rapat Kerja Daerah (RAKERDA) Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur.

Ada beberapa keputusan dari Rapat Kerja Daerah (RAKERDA) Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur dan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten/Kota se-Jawa Timur tahun 2017, yaitu sebagi berikut:

1) Pemantapan Akidah

a) Program Kerja Prioritas.

(1) Program kaderisasi da'i dengan mensosialisasikan pedoman dakwah Majelis Ulama Indonesia melalui koordinasi dan kerjasama dengan ormas Islam dan lembaga keislaman untuk diterjunkan di lingkungan masing-masing.

[90] Wawancara Hari Kamis tanggal 25 Januari 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(2) Membuat rintisan dakwah melalui kegiatan safari dakwah dengan memanfaatkan kader-kader yang sudah terbentuk di masing-masing ormas Islam dan lembaga keIslaman.

(3) Menyelenggarakan kegiatan dialog/mudzakarah lintas ormas dan lembaga keislaman, lembaga dakwah, majelis taklim tentang pentingnya membentengi akidah masyarakat.

(4) Mengadakan kegiatan dialog kepada kelompok-kelompok yang menyimpang ditengah masyarakat menuj u*al-rujuilalhaq*.

(5) Menyelenggarakan kegiatan safari dakwah atau pembinaan akidah kelembaga pendidikan dasar, menengah, dan pendidikan tinggi serta dakwah di lembaga pemasyarakatan.

(6) Menerbitkan buku-buku panduan dakwah dan pemantapan akidah termasuk panduan pemantapan pendidikan dan pengajaran agama di sekolah-sekolah dalam bentuk muatan lokal.

(7) Merekomendasikan Kadis Pendidikan harus memberi kesempatan kepada siswa muslim untuk melaksanakan Sholat Jum'at.

(8) Penuntasan program peta dakwah Majelis Ulama Indonesia Kab/Kota sebagai panduan untuk merencanakan poladakwah efektif, sinergis, dan berkelanjutan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(9) Membuat perencanaan dakwah berbasis peta dakwah dengan melakukan penajaman sesuai dengan kondisi/karakter masing-masing daerah.

(10) Membuat rintisan dakwah melalui media elektronik termasuk media sosial.

(11) Membuat rintisan dakwah kepada para muallaf khususnya di daerah minoritas muslim.

(12) Memantapkan jalinan koordinasi dakwah antar kabupaten kota di seluruh Jawa Timur.

(13) Perintisan dan penguatan lembaga GANNAS ANNAR sebagai wadah pembinaan generasi muda dari ancaman bahaya narkoba.

b) Rekomendasi

(1) Rekomendasi kepada Pemerintah

(a) Kasus Kristenisasi dan pemurtadan.

(b) Kasus aliran sesat dan menyimpang.

(c) Kasus keputusan MK tentang pengisian aliran kepercayaan dalam kolom agama.

(d) Kasus bantuan operasional Majelis Ulama Indonesia.

(e) Penganggaran program pembinaan masyarakat pasca penutupan lokalisasi.

(f) Kasus maraknya penistaan agama.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(2) Rekomendasi kepada Majelis Ulama Indonesia

Majelis Ulama Indonesia menolak secara resmi keputusan MK mengenai penulisan aliran kepercayaan di kolom KTP dan sekaligus mengeluarkan fatwa tentang aliran kepercayaan.

2) Penguatan Ukhuwah

a) Program Kerja Prioritas

(1) Pembentukan dan penguatan Gerakan Umat Islam Bersatu (GUIB) di Majelis Ulama Indonesia Kabupaten / Kota.

(2) Mudzakarah da'i Islam pada tingkat kabupaten/kota.

(3) Silaturrahim antar ormas dan lembaga keislaman.

b) Rekomendasi

(1) Rekomendasi kepada Pemerintah

(a) Memberikan dukungan kepada MUI Pusat untuk menolak aliran kepercayaan dicantumkan dalam kolom agama di KTP.

(b) Menolak program Kemenpora tentang Gerakan Pemuda Membaca Kitab Suci (berbagai agama dalam satu majelis).

(2) Rekomendasi kepada Majelis Ulama Indonesia

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Memberikan teguran kepada Menpora atas program Gerakan Pemuda Membaca Kitab Suci (berbagai agama dalam satu majelis).

3) Ekonomi Umat

a) Mendorong dan melakukan pendampingan untuk mebangun BMT-BMT yang baru di berbagai tempat. Juga kerjasama dengan BMT yang sudah sukses/mapan.

b) Mendorong Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur untuk membentuk pengurus/tim minimal 5 (lima) orang di tingkat kecamatan, guna mengakomodir dana wakaf di daerah masing-masing.

c) Mendorong adanya kerjasama produktif dan profesional antara produsen produk-produk halal Majelis Ulama Indonesia dan umat untuk meningkatkan stabilitas ekonomi berbasis ekonomi syariah.

d) Mendorong terlaksananya kerjasama dengan BAZNAS di perbagai tingkatan untuk menggerakkan sadar zakat, infaq, shadaqah, serta wakaf di kalangan kaum muslimin.

e) Melaksanakan kerjasama dengan dinasins tansiterkait untuk dapat melakukan gerakan pelatihan keterampilan pada anak muda agar mandiri.

f) Melaksanakan pelatihan dengan bekerjasama dengan DSN (Dewan Syariah Nasional) untuk mendapatkan sertifikat syar'i.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Program Bidang Fatwa

Ada beberapa program Bidang Fatwa Majelis Ulama Indonesia, diantaranya sebagai berikut:

1) Mengembangkan kegiatan ilmu syariah di kalangan ulama mengenai berbagai masalah umat Islam sesuai dengan tingkatan kebutuhan dalam memberikan bimbingan dan pedoman hukum bagi umat Islam.
2) Meningkatkan kedudukan dan peranan Komisi Fatwa menuju kesatuan fatwa sebagai forum ilmiah diantara ulama dengan menyelenggarakan pertemuan secara berkala dan sistematis.
3) Meningkatkan dan memperluas fatwa dengan mengundang ulama ASEAN atau yang lainnya untuk mewujudkan kesatuan pandangan, khususnya yang berkaitan dengan *hisab* dan *rukyah*, produk halal, obat-obatan, kosmetik, dan kasus sosial lainnya yang terjadi.
4) Memasyarakatkan hasil kajian ulama Islam dan memberikan masukan kepada instansi pemerintah, lembaga swasta, atau perorangan.
5) Mengusahakan agar fatwa Majelis Ulama Indonesia baik pada tingkat pusat maupun daerah menjadi hukum positif.
6) Sosialisasi hasil fatwa Majelis Ulama Indonesia melalui media cetak dan elektronik, penerbitan, serta media dakwah lainnya.[91]

2. Faktor Penghambat Koordinasi Kinerja Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur.

Pada penyajian data di atas, disebutkan beberapa faktor yang menghambat pelaksanaan koordinasi pada Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur. Beberapa hambatan tersebut seperti ketidakhadiran anggota dalam rapat karena kesibukan/pekerjaan masing-masing serta

[91] Dokumentasi pada Hari Rabu tanggal 1 November 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lokasi tempat tinggal yang jauh, sebenarnya bukan merupakan hambatan yang serius. Seperti yang disampaikan oleh informan berikut.

> Yak karna itu, apalagi sekarang. Sekarang sudah ada namanya WA ya? Jadi masing-masing komisi itu ada punya WA ya. Saya selaku sekretaris umum mengkoordinasi masing-masing. Lha Komisi Dakwah sekarang kegiatan apa kita share ke Komisi Dakwah. Jadi ya hpnya sekretaris umum itu isisnya adalah hpnya komisi-komisi. Komisi punya hpnya sekretaris umum. Semua sekretais umum e komisi hanya punya masing-masing komisi sendiri tapi sekretaris umum punya grupnya sekretaris komisi ya. Lha misalnya Komisi Hukum lagi bahas apa kita masuk kesana ya? Jadi itu yang kita kerjakan. Ya Alhamdulillah dibantu sama teknologi sekarang lebih gampang koordinasi. Sehingga kita rapat bisa walaupun nggak hadir. Misalnya besok ada rapat persiapan ada mudzakaroh kemudian sekaligus persiapan ada kegiatan di Bangkalan udah langsung. Rapat walaupun kita nggak datang udah kita itu. Di sini inini. Jadi seperti itu kita lakukan.[92]

Dari pernyataan di atas dapat diketahui bahwa, sebenarnya tidak ada hambatan yang berarti dalam pelaksanaan koordinasi pada Majelis Ulama Inonesia Provinsi Jawa Timur. Hal ini karena koordinasi tidak hanya bisa dilakukan dengan cara tatap muka atau pertemuan secara langsung, akan tetapi juga bisa melalui media sosial. Seiring dengan kemajuan zaman, maka koordiansi bisa dilakukan dengan mudah karena adanya teknologi yang canggih.

Masalah anggaran dana, Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur mengatasinya dengan lebih kreatif, seperti disampaikan oleh informan berikut.

> Ya walau pun ya kendala apa? Kendala utamanya Majelis Ulama barangkali ya tentu ada kecukupan dana, seperti itu ya. Bagaimana kita mengatasi kecukupan dana diharapkan masing-masing pimpinan komisi ini kreatif. Menggandeng CSR ya. CSR itu bisa perusahaan,

[92] Wawancara pada Hari Kamis tanggal 25 Januari 2108.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bisa mitra dalam bentuk LAZ atau Lembaga Amil Zakat atau donatur-donatur. Ni ya ehm kita kembangkan supaya bisa berdaya. Sebab kalau kita mengandalakan anggaran saja dari pemerintah tentu sangat-sangat tidak cukup untuk operasional kegiatan.[93]

[93] Wawancara pada Hari Kamis tanggal 25 Januari 2108.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V
PENUTUP

A. Simpulan

Penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwa, koordinasi yang digunakan oleh Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur adalah koordinasi internal, eksternal, vertikal, dan horizontal. Koordinasi pada Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur dilakukan dalam bentuk musyawarah/rapat, karena Majelis Ulama Indonesia merupakan forum permusyawaratan atau wadah musyawarah para ulama, zu'ama, serta cendekiawan muslim. Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur memiliki koordinasi yang baik. Hal ini terbukti bahwa, Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur memperoleh nilai tertinggi dari hasil Monitoring dan Evaluasi Akhir Pelaksanaan Kegiatan Majelis Ulama Indonesia Provinsi tahun 2017.

Ada beberapa faktor yang bisa menghambat koordinasi di Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur seperti, ketidakhadiran beberapa anggota dalam rapat, lokasi tempat tinggal yang jauh, serta kesibukan masing-masing sumber daya manusia. Akan tetapi, hal tersebut tidak menjadi hambatan yang berarti untuk tetap melaksanakan koordinasi. Koordinasi tetap bisa dilakukan melalui media sosial. Hal ini termasuk salah satu manfaat dari kemajuan teknologi. Masalah anggaran dana, hal ini bisa disiasati dengan kreatifitas masing-masing pimpinan komisi. Mereka bisa bekerjasama dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

CSR, perusahaan, atau mitra yang lain untuk mengatasi masalah dana tersebut.

B. Saran dan Rekomendasi

Peneliti memiliki beberapa saran dan rekomendasi untuk lembaga yang dijadikan sebagai tempat penelitian, yaitu sebagai berikut:

1. Sebaiknya rapat dilaksanakan tepat waktu sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, sehingga dapat berjalan dengan lebih efektif.
2. Jika pimpinan rapat memiliki keperluan lain di tengah-tengah rapat (ketika rapat seharusnya belum selesai), hendaknya mewakilkannya kepada wakilnya atau orang yang dipercayainya untuk melanjutkan rapat. Dengan demikian, koordinasi akan tetap berjalan dengan efektif. Jika suatu rapat tidak dilaksanakan sampai tuntas atau mencapai kesepakatan bersama, maka suatu permasalahan yang di bahas dalam rapat tersebut tidak akan jelas hasilnya.

C. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini masih jauh dari kata sempurna. Masih banyak kekurangan dalam penelitian ini. Hal tersebut karena keterbatasan peneliti dalam melakukan penelitian ini. Peneliti tidak bisa mengikuti kegiatan koordinasi lebih banyak. Peneliti belum banyak memiliki data terkait koordinasi kinerja, dikarenakan peneliti tidak bisa mengikuti banyak rapat koordinasi yang dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur. Hanya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

beberapa rapat saja yang bisa diikuti oleh peneliti. Hal ini karena ada rapat yang dilaksanakan pada waktu-waktu tertentu, ada rapat yang dilakukan oleh bagian-bagian tertentu, dan sebagainya.

Untuk peneliti selanjutnya, diharapkan agar melakukan penelitian lebih detail. Peneliti tersebut diharapkan untuk banyak mengikuti atau menyaksikan secara langsung kegiatan-kegiatan atau rapat-rapat koordinasi di Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur. Hal ini supaya peneliti tersebut dapat mengetahui secara langsung jalannya koordinasi-koordinasi dan mendapatkan data-data yang lebih detail dan banyak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Daftar Pustaka

Anwar, *Metodologi Penelitian*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2007.

Arifiin, Rois & Helmi Muhammad, *Pengantar Manajemen*, Empatdua, Malang, 2016.

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan dan Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta, 2006.

Bungin, Burhan, *Penelitian Kualitatif: Edisi Kedua*, Kencana, Jakarta, 2011.

Chutmaisinthia, Mona Variesta Inna, *Koordinasi Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Penyaluran Dana Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) di Desa Ngepanrejo Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang*, Skripsi, Yogyakarta: Jurusan Siyasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Effendy, Ek. Mochtar, *Manajemen: Suatu Pendekatan Berdasarkan Ajaran Islam*, Bhratara, Jakarta, 1996.

Fajriana, Nur, *Koordinasi Kepala Desa dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Suatang Keteban Kecamatan Pasir Belengkong Kabupaten Paser*, eJournal Ilmu Pemerintahan, Vol. 2 No. 2, tahun 2014.

Foster, D.W., *Manajemen Perusahaan manajemen yang sukses di perusahaan*, Erlangga, Jakarta 1984.

Fred Luthans, *Perilaku Organisasi: Edisi 10*, ANDI, Yogyakarta, 2006.

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research II*, Andi Offset, Yogyakarta, 2002.

Hakim, Lukman dan Widodo J. Pudjirahardjo, *Optimalisasi Proses Koordinasi Program Keselamatan Pasien (Patient Safety) di Rumah Sakit X Surabaya*, Jurnal Administrasi Kesehatan Indonesia,Vol. 2, No. 3, Juli-September 2014.

Hartanto, Frans Mardi, *Paradigma Baru Manajemen Indonesia*, Mizan Pustaka, Bandung 2009.

Herlambang, Susatyo, *Pengantar Manajemen: Cara Mudah Memahami Ilmu* Manajemen, *Cetakan Pertama*, Gosyen Publishing, Yogyakarta, 2013.

Kasmir, *Manajemen Sumber Daya Manusia (Terori dan Praktik)*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Koentjoningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia Pustaka Umum, Jakarta, 1994.

M. Hanafi, Mamduh, *Manajemen: Cetakan 1*, UPP AMP YKPN, Yogyakarta, 1997.

Martha, Evi & Sudarti Kresno, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Untuk Bidang Kesehatan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016.

Mediana, Viska, *Analisis Koordinasi Dinas Perhubungan dalam PenyediaanPelayanan Jasa Transportasi Angkutan Kota di Depok*, Skripsi, Depok: Progam Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia.

Mochtar Effendy, Ek., *Manajemen: Suatu Pendekatan Berdasarkan Ajaran Islam*, Bharatara, Jakarta, 1996.

Moeheriono, *Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.

Moekijat, *Koordinasi (Suatu Tinjauan Teoritis) Cetakan Pertama*, Mandar Maju, Bandung, 1994.

Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosydakarya, Bandung, 2008.

Nawawi Uha, H. Ismail, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, VIV Press, Jakarta, 2013.

Noor, Juliansyah, *Penelitian Ilmu Manajemen: Tinjauan Filosofis dan Praktis*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013.

P. Robbins, Stephen, *Prinsip-Prinsip Perilaku Organisasi: Edisi 5*, Erlangga, Jakarta 2002.

P. Siagian, Sondang, *Manajemen Abad 21*, Bumi Aksara, Jakarta, 1998.

Panglaykim, Tanzil, Hazil, *Manajemen Suatu Pengantar*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1960.

Pedoman Penyelenggaraan Organisasi Majelis Ulama Indonesia, Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur, Surabaya, 2013.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ritonga, Soritua, *Koordinasi antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa di Desa Batang Pane III Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara*, Jurnal Ilmiah, Vol. 1, No. 2, Agustus 2017.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2015.

Usman, Husaini, *Manajemen: Teori Praktik dan Riset Pendidikan Edisi kedua*, Bumi Aksara, Jakarta, 2008.

W. Griffin, Ricky, *Manajemen: Jilid 1*, Erlangga, Jakarta, 2004.

Widjaya, A.W., *Perencanaan Sebagai Fungsi Manajemen*, PT Bina Aksara, Jakarta, 1987.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Anwar, *Metodologi Penelitian*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2007.

Arifiin, Rois & Helmi Muhammad, *Pengantar Manajemen*, Empatdua, Malang, 2016.

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan dan Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta, 2006.

Bungin, Burhan, *Penelitian Kualitatif: Edisi Kedua*, Kencana, Jakarta, 2011.

Chutmaisinthia, Mona Variesta Inna, *Koordinasi Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Penyaluran Dana Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) di Desa Ngepanrejo Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang*, Skripsi, Yogyakarta: Jurusan Siyasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Effendy, Ek. Mochtar, *Manajemen: Suatu Pendekatan Berdasarkan Ajaran Islam*, Bhratara, Jakarta, 1996.

Fajriana, Nur, *Koordinasi Kepala Desa dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Suatang Keteban Kecamatan Pasir Belengkong Kabupaten Paser*, eJournal Ilmu Pemerintahan, Vol. 2 No. 2, tahun 2014.

Foster, D.W., *Manajemen Perusahaan manajemen yang sukses di perusahaan*, Erlangga, Jakarta 1984.

Fred Luthans, *Perilaku Organisasi: Edisi 10*, ANDI, Yogyakarta, 2006.

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research II*, Andi Offset, Yogyakarta, 2002.

Hakim, Lukman dan Widodo J. Pudjirahardjo, *Optimalisasi Proses Koordinasi Program Keselamatan Pasien (Patient Safety) di Rumah Sakit X Surabaya*, Jurnal Administrasi Kesehatan Indonesia,Vol. 2, No. 3, Juli-September 2014.

Hartanto, Frans Mardi, *Paradigma Baru Manajemen Indonesia*, Mizan Pustaka, Bandung 2009.

Herlambang, Susatyo, *Pengantar Manajemen: Cara Mudah Memahami Ilmu* Manajemen, *Cetakan Pertama*, Gosyen Publishing, Yogyakarta, 2013.

Kasmir, *Manajemen Sumber Daya Manusia (Terori dan Praktik)*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Koentjoningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia Pustaka Umum, Jakarta, 1994.

M. Hanafi, Mamduh, *Manajemen: Cetakan 1*, UPP AMP YKPN, Yogyakarta, 1997.

Martha, Evi & Sudarti Kresno, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Untuk Bidang Kesehatan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016.

Mediana, Viska, *Analisis Koordinasi Dinas Perhubungan dalam PenyediaanPelayanan Jasa Transportasi Angkutan Kota di Depok*, Skripsi, Depok: Progam Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia.

Mochtar Effendy, Ek., *Manajemen: Suatu Pendekatan Berdasarkan Ajaran Islam*, Bharatara, Jakarta, 1996.

Moeheriono, *Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.

Moekijat, *Koordinasi (Suatu Tinjauan Teoritis) Cetakan Pertama*, Mandar Maju, Bandung, 1994.

Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosydakarya, Bandung, 2008.

Nawawi Uha, H. Ismail, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, VIV Press, Jakarta, 2013.

Noor, Juliansyah, *Penelitian Ilmu Manajemen: Tinjauan Filosofis dan Praktis*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013.

P. Robbins, Stephen, *Prinsip-Prinsip Perilaku Organisasi: Edisi 5*, Erlangga, Jakarta 2002.

P. Siagian, Sondang, *Manajemen Abad 21*, Bumi Aksara, Jakarta, 1998.

Panglaykim, Tanzil, Hazil, *Manajemen Suatu Pengantar*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1960.

Pedoman Penyelenggaraan Organisasi Majelis Ulama Indonesia, Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur, Surabaya, 2013.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ritonga, Soritua, *Koordinasi antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa di Desa Batang Pane III Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara*, Jurnal Ilmiah, Vol. 1, No. 2, Agustus 2017.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2015.

Usman, Husaini, *Manajemen: Teori Praktik dan Riset Pendidikan Edisi kedua*, Bumi Aksara, Jakarta, 2008.

W. Griffin, Ricky, *Manajemen: Jilid 1*, Erlangga, Jakarta, 2004.

Widjaya, A.W., *Perencanaan Sebagai Fungsi Manajemen*, PT Bina Aksara, Jakarta, 1987.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id